



RENCANA STRATEGIS



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS
2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan serta indikator target sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang telah dilakukan indikator dan program prioritas dan strategis.

Penyusunan Dokumen Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kebijakan yang terlibat dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis. Semoga semua upaya yang kita kerjakan selalu mendapat rahmat, hidayah dan ridha Allah SWT, Aamiin.

Bengkalis, Desember 2025
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



ERMANTO, SKM., MKM
NIP. 19801216 200801 1 011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 225/KPTS/IV/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029.....	
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029.....	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	
2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	
a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Kesehatan	
b. Sumber Daya Dinas Kesehatan	
c. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	
d. Kelompok Sasaran Layanan	
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.....	
b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Bengkalis.....	
c. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Mandau.....	
d. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkalis	
e. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.....	
f. Isu Startegis.....	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan.....	
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	
3.3 Strategi Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan.....	
3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Uraian Program.....	
4.2 Uraian Kegiatan	

4.3	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator Target, Dan Pagu Indikatif
4.4	Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Dinas Kesehatan.....
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan.....
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
4.7	Intervensi Layanan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

- 2.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Profesi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....
- 2.2 Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 .
- 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2024
- 2.4 Capaian Kinerja Anggaran SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024.....
- 2.5 Capaian Kinerja Anggaran SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Bengkalis Dinas Kesehatan sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024
- 2.6 Capaian Pelayanan SPM berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Mandau sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024
- 2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.....
- 2.7 Capaian Pelayanan SPM bersasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024
- 2.8 Capaian Pelayanan SPM berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Bengkalis sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024
- 2.9 Capaian Pelayanan SPM berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Mandau sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024
- 2.10 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.....
- 2.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Bengkalis Kabupaten Bengkalis
- 2.12 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis.....
- 2.13 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.14 Tantangan Permasalahan secara global dalam Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2025-2029	
2.15 Telaah Kesesuaian Renstra Kementrian Kesehatan Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029	
3.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025-2029	
4.1 Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.....	
4.2 Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan RSUD Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	
4.3 Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis	
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	
4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	
4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	
4.7 Intervensi Layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang mengacu pada RPJMD
- 2.1 Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).

Renstra OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Secara lebih jelas bahwa Rencana Strategis itu sendiri merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2025-229 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang.

Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat. Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten bengkalis ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten bengkalis, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten bengkalis dan stakeholder lainnya yang ada di Bengkalis.

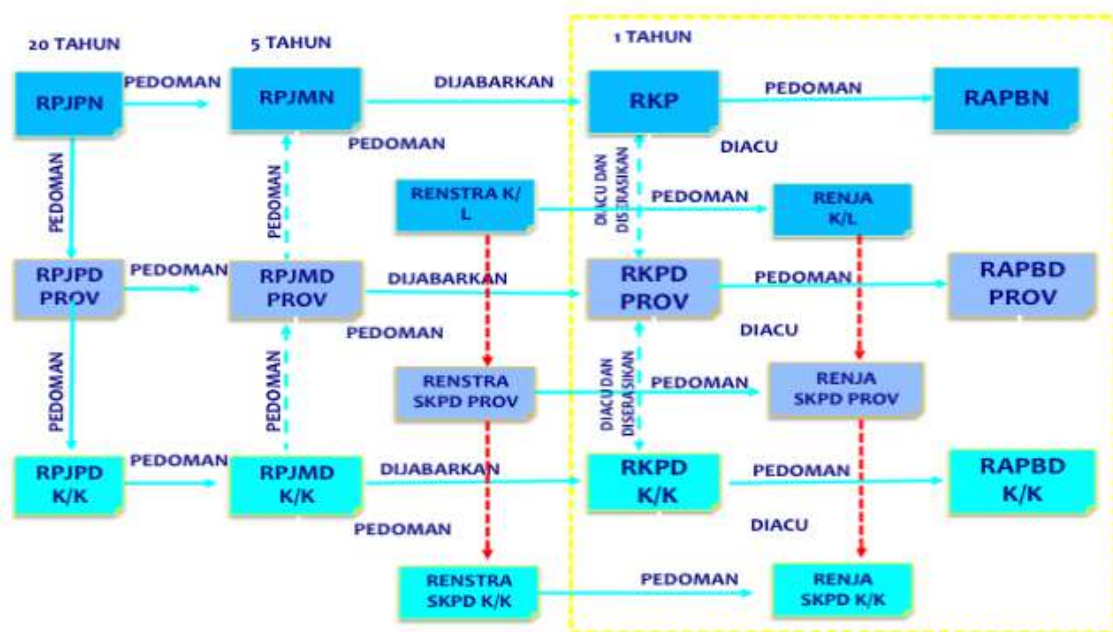
Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025 – 2029 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Perda No 3 Tahun 2021 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2026, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang kesehatan. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang mengacu pada RPJMD



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025 – 2029 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 900.1.15.5-1317 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah tahun 2025 – 2029.
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten.
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun kedepan;
2. Untuk menjabarkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah;
3. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dilakukannya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta pencapaian kinerja pada setiap tahun;

- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025– 2029 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 urusan kesehatan sehingga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 – 2029.

Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan evaluasi yang penting agar pembangunan berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang kesehatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

1. Subab gambaran pelayanan

Subab gambaran pelayanan ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Termasuk SPM sesuai dengan tupoksinya, dan kelompok sasaran layanan. Subab ini juga bisa ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi seperti mitra dalam pemberian pelayanan, dukungan dalam pencapaian kinerja, serta Kerjasama daerah (apabila ada)

2. Subab Permasalahan dan Isu Strategis memuat permasalahan pelayanan dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan Renstra, sasaran Renstra, strategis Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra serta arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, Indikator, target, dan Pagu Indikatif, Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Target Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Dinas Kesehatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Kesehatan

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis : Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi;

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- 3) Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya Kesehatan;

- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

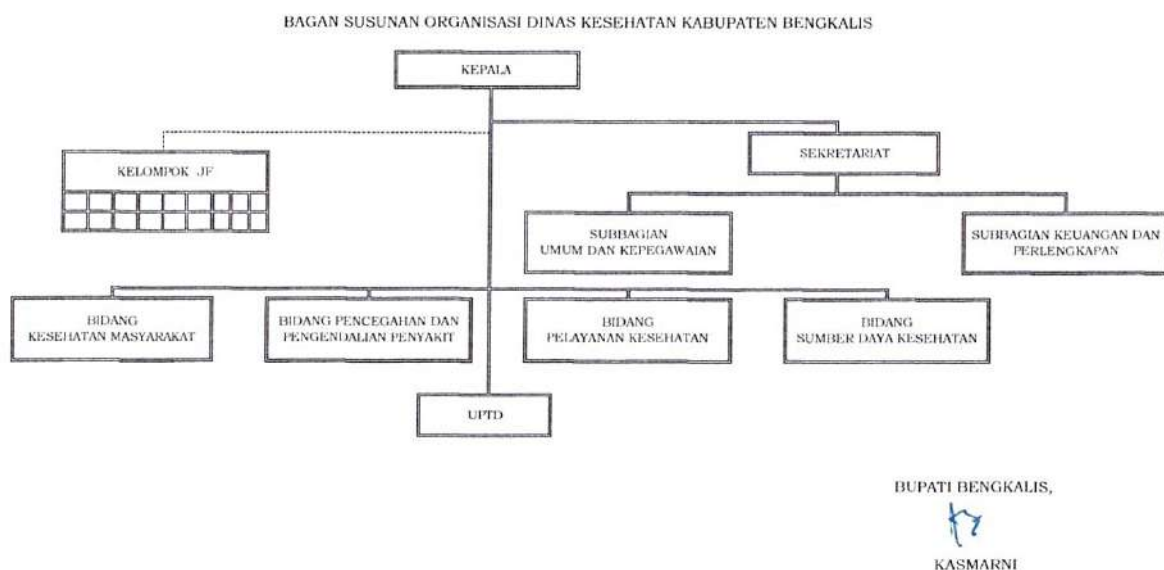
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- 1) Sekretariat terdiri dari Subagian Umum dan Kepegawaian; Subagian Keuangan dan Perlengkapan; Kelompok JF
- 2) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari Kelompok JF
- 3) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Kelompok JF
- 4) Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari Kelompok JF
- 5) Kelompok JF
- 6) UPT

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2024

b. Sumber Daya Dinas Kesehatan

1) Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk program dan kegiatan kesehatan berpengaruh besar dari ketersediaan fasilitas dan sumber daya kesehatan, meliputi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), baik sarana dan peralatan kesehatan serta sarana penunjang dan pembiayaan kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di unit pelayanan Kesehatan Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 2.635 orang yang tersebar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.1
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Profesi
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Tenaga Medis		
	dr. Spesialis	129	
	dr. Umum	213	
	drg (Dokter Gigi)	69	
	drg. Spesialis	3	
2	Tenaga Keperawatan	712	
3	Tenaga Kebidanan	733	
4	Tenaga Kefarmasian	245	
5	Promosi Kesehatan / Tenaga Kesehatan Masyarakat	112	
6	Tenaga Sanitasi (Kesehatan Lingkungan)	43	
7	tenaga Nitrisionis (Gizi)	72	
8	Tenaga Ahli Teknik Laboratorium Medik	133	
9	Teknik Biomedika	44	
10	Keterampilan Fisik	40	
11	Keteknisan Medis	87	
TOTAL		2635	

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2024

2) Sarana dan Fasilitas Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional. Sarana dan prasarana tersebut berupa gedung pelayanan dan kendaraan operasional. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah diupayakan dapat menjangkau masyarakat di semua wilayah dengan berbagai kondisi. Untuk mendekatkan masyarakat kepada akses pelayanan kesehatan, Puskesmas dilengkapi jejaringnya yaitu Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Tabel 2.2
Sarana Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA							
		KEMENKES	PEM. PROV	PEM. KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RUMAH SAKIT									
1	RUMAH SAKIT UMUM			3			4		7
2	RUMAH SAKIT KHUSUS								-
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA									
1	PUSKESMAS RAWAT INAP			7					7
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR			67					67
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			13					13
3	PUSKESMAS KELILING			20					20
4	PUSKESMAS PEMBANTU			59					59
SARANA PELAYANAN LAIN									
1	KLINIK PRATAMA						44		44
2	KLINIK UTAMA						3		3
3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER						15		15
4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI						3		3
5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS								-
6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN								-
7	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI PERAWAT								-
8	GRIYA SEHAT								-

9	PANTI SEHAT							-
10	UNIT TRANSFUSI DARAH							-
11	LABORATORIUM KESEHATAN			1				1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI					0		-
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)					0		-
3	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)					1		1
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN					0		-
5	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)					0		-
6	INDUSTRI KOSMETIKA					0		-
7	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)					1		1
8	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)					0		-
9	APOTEK					102		102
10	TOKO OBAT					59		59
11	TOKO ALKES					0		-

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2024

c. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di bidang Kesehatan. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD.

Capaian pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2025 sebagai berikut ;

Tabel 2.3
Indikator **Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan** Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2024

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						KETERANGAN
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	-	71,2	71,36	71,55	71,71	71,86	72,03	72,2	DISKES
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000	4	3,7	3,5	3,2	3	2,8	2,5	DISKES
3	Angka Kematian Balita (AKB)	Per 1000	4,1	3,7	3,4	3	2,7	2,4	2	DISKES
4	Angka Kematian Neonatal	Per 1000	3,6	3,2	3	2,7	2,4	2,1	1,9	DISKES
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000	201	191	181	172	164	156	148	DISKES
6	Persentase Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	20	20	17	15	14	12	10	DISKES
7	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000	65	65	65	65	65	65	65	DISKES
8	Angka kesakitan malaria	Per 1000	<1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	DISKES
9	Angka kesembuhan penderita TB dan paru	Angka	376	376	414	456	546	546	546	DISKES
10	Prevalensi HIV	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DISKES
11	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Nilai Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD BENGKALIS
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88	88	89	91	92	93	95	RSUD BENGKALIS
13	Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	RSUD BENGKALIS
14	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Nilai Akreditasi	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD MANDAU
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88	88	90	91	92	93	94	RSUD MANDAU
16	Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B	B	B	RSUD MANDAU

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Angka Kematian Ibu masih tinggi dengan capaian sebesar 173.59
- 2) Angka Kematian Bayi masih tinggi dengan capaian sebesar 9.22
- 3) Peninkatan angka kesakitan penyakit tidak menular sebesar 6.01
- 4) Peningkatan Prevalensi gizi buruk yang semakin tinggi sebesar 3.65
- 5) Kesakitan penyakit menular yang saat ini meskipun sudah terus mengalami penurunan namun dengan adanya pandemic covid-19 saat ini juga menjadi prioritas
- 6) Kualitas pelayanan yang masih belum maksimal ditunjang oleh hasil survey kepuasan masyarakat yang masih pada kategori C

Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), Masyarakat melalui berbagai mekanisme seperti JKN-KIS, iuran Kesehatan dan Swadaya, serta Swasta melaui asuransi swasta, perusahaan dan donasi. UU No 17 tentang Kesehatan menghapus kewajiban alokasi minimal 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan (mandatory spending) yang ada dalam UU No. 36 Tahun 2009, namun pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan APBN dan APBD diprioritaskan untuk pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, lansia, dan anak terlantar.

Anggaran kesehatan yang terealisasi saat ini cukup memadai untuk kebutuhan peningkatan kesehatan di Kabupaten Bengkalis yang masih memerlukan upaya kuratif yang lebih tinggi, sehubungan dengan jumlah masyarakat miskin yang semakin bertambah dan meningkatnya

penyakit degeneratif atau penyakit tak menular dengan bertambahnya usia harapan hidup. Namun sesuai dengan peningkatan kesehatan masyarakat dan meningkatnya usia harapan hidup manusia di Kabupaten Bengkalis, diharapkan kendali pembiayaan diikuti kepada berkurangnya realisasi anggaran untuk kuratif dan rehabilitatif dan diikuti realisasi pembiayaan promotif dan preventif yang seimbang.

Capaian Kinerja Anggaran SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Anggaran SKPD berdasarkan **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan** sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024

KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUUTCOME / OUTPUT		TARGET & REALISASI KINERJA / TAHUN											
				2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan		100	97.733.152.836	92,65	100	124.128.295.344	94,40	100	149.821.793.064	93,48	100	166.911.326.250	91,24
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		90	235.589.000	91,09	90	491.756.200	94,06	90	375.206.560	96,92	90	291.558.333	85,43
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	96.447.000	84,64	5	167.602.700	99,80	5	375.206.560	96,92	5	87.733.133	96,65
		Jumlah hasil penyusunan perencanaan SKPD Jumlah perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas													

1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		49	139.142.000	96,17	49	324.153.500	91,35	49	162.387.000	94,49	49	203.825.200	81,37
		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Laporan realisasi keuangan													
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan		100	88.711.749.872	92,53	100	93.001.059.269	97,73	100	111.437.082.376	94,55	100	126.902.745.138	93,53
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		690	88.711.749.872	92,53	690	93.001.059.269	97,73	690	111.437.082.376	94,55	690	126.902.745.138	93,53
		Tersedianya Belanja Pegawai													
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	1.655.619.550	94,65	100	1.510.702.100	90,01	100	1.507.551.500	98,63	100	1.904.026.400	85,66
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12	1.597.390.000	95,40	12	1.263.483.000	89,34	12	1.347.200.000	98,83	12	1.612.399.000	83,51
		Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor													

1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan		12	58.229.550	77,97	12	247.219.100	93,61	12	160.351.500	97,05	12	291.627.400	99,87
		Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan													
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	153.501.000	72,56	100	1.228.930.000	90,11	100	826.258.002	99,71	100	155.360.922	40,71
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur mengikuti pelatihan teknis dan fungsional		150	32.815.000	80,40	50	1.069.783.000	95,97	50			50	-	0,00
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20	120.686.000	70,68	20	159.147.000	63,90	20	826.258.002	99,71	20	155.360.922	85,54
		ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun													
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1.485.266.015	87,80		2.237.848.281	81,99		3.085.935.234	88,12		2.604.190.247	78,55
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas		1	30.380.000	100,00	1	56.400.000	100,00	1	49.112.000	57,64	1		

1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	503.382.820	98,52	2	959.648.600	95,06	2	1.751.151.600	84,49	2	1.234.918.084	68,69
		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor													
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	176.197.000	70,52	1	94.175.000	99,88	1	106.520.000	68,67	1	203.230.000	67,12
		Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas													
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	159.369.700	99,56	1	164.861.800	99,71	1	140.484.800	97,30	1	130.570.390	75,55
		Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas													
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		38	40.500.000	100,00	38	39.622.000	43,46	12	78.900.000	97,17	38	99.350.000	98,03
		Jumlah terbitan surat kabar/ majalah													
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400	575.436.495	82,21	400	660.803.582	98,89	400	959.766.834	99,63	400	936.121.773	99,53
		Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi 12 bulan													

1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-											
1.02.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana kendaraan dinas roda 2 Jumlah sarana kendaraan dinas roda 4 (Operasional DBD)	-											
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.070.165.206		100	2.237.848.281	81,99	100	2.386.369.909	88,78	100	2.031.440.032	76,61
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	903.390.000	100,00	12	888.000.000	79,40	12	875.000.000	97,56	12	561.093.000	68,67
		Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun												
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	536.375.206	88,03	12	614.815.429	90,47	12	745.372.107	91,90	12	731.595.247	86,07
		Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor dinas Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat												

1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	630.400.000	99,49	12	735.032.852	78,90	12	765.997.802	78,16	12	738.751.785	75,04
		Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas jabatan/operasional													
1.02.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	3.421.262.193		100	6.885.629.708	90,52	100	2.803.253.652	89,91	100	2.707.650.135	77,79
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		45	479.916.693	83,02	45	2.936.559.088	84,41	45	1.027.857.683	86,43	45	627.970.127	91,38
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas													
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	1.386.955.000	98,21	2	1.140.800.000	94,31	2	1.299.200.000	90,22	2	1.588.880.000	77,30
		Jumlah Tenaga Kebersihan kantor													
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	1.554.390.500	99,09	2	2.808.270.620	96,23	2	476.195.969	97,42	2	490.800.008	66,50

		Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas Jumlah sarana peralatan kantor Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor													
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD		0			100	16.534.5 21.505	82,43	100	27.400.1 35.831	90,28	100	30.314.3 55.043	86,97
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0			18	16.534.5 21.505	82,43	20	27.400.1 35.831	90,28	20	30.314.3 55.043	86,97
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			114.226. 461.587	77,66		147.925. 794.757	93,56		185.790. 575.348	86,11		147.372. 423.804	71,65
		Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan		95	46.617.3 36.706	87,47	100	54.194.0 11.801	95,23	100	83.540.1 44.282	84,10	100	36.596.1 84.404	48,89

1.02.02.2.01. 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		8			8			8	2.347.57 7.778	68,50	8	2.775.25 4.965	78,57
1.02.02.2.01. 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		3			3			3	1.099.02 2.311	61,96	3	2.006.58 8.741	96,44
1.02.02.2.01. 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1			1			1	5.984.14 7.079	96,05	1	2.433.96 6.111	44,71
1.02.02.2.01.00 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		4			4			4	1.300.24 2.474	46,17	4	2.652.85 7.530	80,64
1.02.02.2.01.00 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		25			25			25	5.528.99 1.725	67,57	25	5.771.84 3.208	79,32

1.02.02.2.01.0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah bangunan pendukung gedung kantor Jumlah pembangunan baru dan renovasi/rehabilitasi Puskesmas Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Batin Solapan jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Bukit Batu dan Bandar Laksamana jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Mandau jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Pinggir jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Rupert jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Rupert Utara jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Siak Kecil jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Tualang Mandau		20	20.424.3 26.612	96,87	20	35.429.0 26.559	95,82	20	600.000. 000	100,0 0	20		
-------------------	--	--	--	----	--------------------	-------	----	--------------------	-------	----	-----------------	------------	----	--	--

1.02.02.2.01.0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan tanah bangunan kesehatan Jumlah pengadaan peralatan dan BMHP pengendalian penyakit Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengukur status gizi balita		3	3.112.910.400	95,07	3	76.704.000	99,65	3	1.005.570.000	65,32			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		25	7.955.613.724	74,17	25	7.940.765.107	94,11	25	19.202.233.389	81,62	25	15.152.314.606	35,99
		Jumlah Penemuan dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular Jumlah peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar Jumlah Puskesmas yang menerima sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar													
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center		10			10			10	168.320.300	62,57	10	99.900.000	37,15

1.02.02.2.01.0016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yang tersedia dipuskesmas Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Jumlah Sarana Kefarmasian Obat dan Makanan Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar		150	4.011.38 2.501	71,98	150	2.782.76 9.425	97,96	150	2.085.95 6.165	85,19	0		
1.02.02.2.01.0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas		100	11.113.1 03.469	87,93	100	7.964.74 6.710	92,88	100	1.740.73 7.608	67,24	0		
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		1			1			1			1	2.310.35 9.035	51,95
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		0			0			0			50	3.393.10 0.208	52,87

1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Kesehatan		100	66.954.3 91.881	71,92	100	92.952.5 95.756	92,62	100	101.550. 992.206	87,85	100	110.208. 802.769	84,71
1.02.02.2.02. 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		123 94	163.397. 400	90,06	123 94	2.186.55 6.379	90,54	12.9 15	1.118.44 0.165	36,51	12.9 15	1.312.90 3.033	95,16
		Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4) Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah puskesmas yang melaksanakan P4K sesuai standar Jumlah puskesmas yang melaksanakan P4K sesuai standar (Kebutuhan Darah)													
1.02.02.2.02. 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		118 31	10.140.7 72.386	99,79	118 31	883.729. 339	62,60	12.3 28	425.133. 317	95,62	12.3 28	619.939. 063	77,46

		Jumlah pertolongan persalinan difasilitas kesehatan Jumlah UPT Puskesmas dan RSUD yang menerima Bantuan Operasional Kesehatan Jaminan Persalinan umlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan													
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11268	21.180.000	78,44	11268	36.280.000	99,94	11.741	174.596.600	88,32	11.741	487.432.520	96,91
		Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		546	433.119.000	85,89	546	828.801.630	92,40	59.955	335.801.631	74,92	59.955	499.424.006	97,37
		Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Jumlah Posyandu aktif													
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		13935	95.042.500	98,43	13935	875.549.200	99,00	101.898	95.463.900	13,72	101.898	1.127.359.914	93,85

		Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI diimunisasi Pemeriksaan kesehatan anak didik kelas 1, 7 dan 10 oleh tenaga kesehatan													
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		398 57			398 57			393. 331	381.242. 400	97,30	393. 331	167.296. 780	83,65
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		353 39	45.829.9 00	60,40	353 39	122.475. 100	99,76	40.2 92	140.217. 000	47,67	40.2 92	341.626. 626	97,61
		Jumlah posyandu lansia aktif													
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		122 61	76.320.0 00	99,87	122 61	229.358. 850	94,68	133 52	111.716. 020	99,21	133 52	204.948. 400	97,61
		Jumlah penderita hipertensi usia >15 Tahun yang medapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		806 67	60.940.0 00	98,86	806 67	173.662. 500	92,87	8.77 3	573.849. 060	99,60	8.77 3	612.876. 060	99,98
		Jumlah penderita diabetes melitus usia > 15 yang medapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													

1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		909			909			988	375.605.800	96,27	988	269.218.933	82,84
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		9663	102.218.300	80,36	9663	394.682.680	99,25	10.342	587.809.400	40,26	10.342	2.061.440.900	96,06
		Jumlah penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif													
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		14957	273.653.300	94,29	14957	524.536.320	99,13	13.994	975.170.760	98,18	13.994	675.456.897	61,17
		Jumlah penderita baru HIV/AIDS													
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		1	2.654.391.543	50,01	1	2.837.760.584	92,76	1	1.089.940.640	99,91	1	561.393.200	94,74
		Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam													
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00

1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		17			17			17			17		
		Balita dengan gizi kurang (kurus) Jumlah anak balita yang mendapatkan pencegahan stunting sesuai standar Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan Meningkatnya peran serta lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi Stunting			1.177.725.200	80,38		3.283.476.197	92,26		6.441.593.393	88,35		5.174.928.552	96,44
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2			2			2			2		
		Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja Puskesmas menyelenggarakan pembinaan kesehatan olahraga kelompok masyarakat			62.635.000	89,33		134.774.000	83,61		503.280.800	90,21		98.074.000	54,49
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		2	730.744.500	80,36	2	508.886.817	97,68	2	794.521.800	79,96	2	1.292.569.392	85,61

		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemecuan SBS dan CTPS Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat													
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1			1			1	381.448.000	97,89	1	444.284.280	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		1	55.150.000	61,32	1	69.297.208	65,16	1	46.803.600	73,44	1		
		Jumlah kelompok kesehatan tradisional yang dibina di Puskesmas													
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		3	311.480.000	85,29	3	530.545.400	90,92	3	495.088.090	84,08	3	1.187.845.962	83,30
			Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan												
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		999	354.058.500	68,15	999	458.906.000	90,38	999	137.788.200	96,15	999	188.003.238	94,00

		Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa dan Napza													
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		10	526.726.960	79,52	10	2.063.676.848	98,27	10	3.802.206.204	94,97	10	5.047.333.376	91,65
		Jumlah ibu hamil yang di screening Jumlah kasus gigitan HPR positif mendapat Vaksin Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 - 50 tahun Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD kelas 1 dan 3 Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan Jumlah penderita diare pada balita yang diobati Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD													
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1	25.805.034.106	59,37	1	52.520.476.026	95,43	1	71.549.816.949	90,24	1	76.188.467.209	85,39

		Jumlah pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan Jumlah peserta BPJS Non Kapitasi yang dilayani Jumlah peserta Jamkesmasda integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan di FKTP Jumlah Puskesmas yang melaksanakan jaminan pelayanan kesehatan													
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0			0			1	4.330.000	32,15	1	4.482.450	2,99
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		1	611.785.300	95,42	1	858.569.780	96,06	1	107.370.151	93,70	1	94.129.200	99,90
		jumlah kecamatan yang dilakukan studi EHRA													
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1	557.400.000	96,77	1			1			1	2.446.000	0,17
		Penanganan KIPI dalam rangka Imunisasi Covid - 19													

1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1	12.250.973.486	89,12	13.558.373.862	84,18	1	8.871.966.057	91,24	1	8.129.687.357	77,11
		Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap memberikan pelayanan sesuai dengan standar (BLUD) Puskesmas BLUD												
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1	10.760.906.100	84,29	9.872.221.036	93,17	1			1	144.000.100	34,73
		Jumlah Puskesmas yang menerima Bantuan Operasional Kesehatan												
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		2	240.308.400	26,39			2	1.422.600.408	89,25	2	491.714.079	98,89
		Jumlah Puskesmas Terakreditasi												

1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0	-	0,00	0	-	0,00	1	15.035.000	49,69	1	11.160.000	40,86
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1			1			1	353.668.991	93,59	1	325.950.000	63,91
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0	-	0,00		-	0,00	0	80.140.000	85,34		320.478.000	94,59
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0	-	0,00		-	0,00	0	-	0,00		243.675.012	98,64
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		1			1			1	158.347.870	90,29	1	238.833.230	99,04
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok		1			1			1			1		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1			1			1			1	321.165.000	97,75

1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1			1			1			1	1.318.260.000	93,41
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menggunakan sistem informasi kesehatan		100	212.930.000	90,65	100	177.391.200	84,21	100	189.726.960	97,35	100	316.523.600	68,40
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		12	212.930.000	90,65	12	177.391.200	84,21	12	189.726.960	97,35	12	316.523.600	68,40
		Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik													
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	441.803.000	96,90	100	601.796.000	93,77	100	509.711.900	82,63	100	250.913.031	97,71
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya													

1.02.02.2.04.00 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		6	41.296.000	78,78	6	43.368.100	82,75	6	243.819.800	80,07	6	146.432.069	96,87
		Terlaksananya Manejemen Puskesmas Sesuai Standar Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas DTPK													
1.02.02.2.04. 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		1	400.507.000	99,25	1	558.427.900	94,75	1	265.892.100	85,12	1	104.480.962	98,92
		Jumlah pelayanan kesehatan rujukan di strata 1 Jumlah Rumah Sakit memberikan pelayanan sesuai dengan standar													
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		100	15.049.888.133	85,75	100	14.489.172.200	92,21	100	18.831.759.092	91,66	100	15.350.240.658	87,50
		Persentase Fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin													
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan		585	4.320.000	65,85	585	68.720.000	48,06	585	31.620.000	75,79	585	30.480.000	48,38

1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		32			32			32	14.760.000	72,50	32	14.320.000	98,97
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		585			585			585			585		
		Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk sarana kesehatan Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk tenaga dan sarana kesehatan			4.320.000	65,85		68.720.000	48,06		16.860.000	78,93		16.160.000	33,30
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100	14.987.28.133	85,73	100	13.934.219.200	92,54	100	18.326.852.792	93,14	100	14.105.621.672	88,04
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		8	35.100.000	78,24	8	80.808.200	46,39	8	63.763.373	92,52	8	-	0,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		152	14.903.508.133	85,71	152	13.671.500.000	93,80	152	18.031.600.000	94,00	152	13.900.700.000	88,93

1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		30	48.620.000	97,71	30	181.911.000	59,07	30	231.489.419	54,37	30	204.921.672	54,89
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		100	58.340.000	94,46	100	486.233.000	94,75	100	473.286.300	57,29	100	1.214.138.986	83,31
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		585	58.340.000	94,46	585	486.233.000	94,75	585	473.286.300	57,29	585	1.214.138.986	83,31
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		100	358.030.000	81,58	100	443.360.800	90,30	100	233.591.600	95,57	100	261.110.930	87,40
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan													
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		90	219.380.000	88,95	90	259.690.000	86,56	90	149.101.600	94,53	90	89.750.000	72,46

1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		18	175.440.000	88,78	18	211.150.000	89,85	18	84.801.600	90,76	18	89.750.000	72,46
1.02.04.2.01.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Puskesmas, toko obat, apotek, toko bahan makanan dan swalayan yang mendapatkan pengawasan		25	43.940.000	89,66	25	48.540.000	74,68						
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		56	138.650.000	72,11	56	183.670.800	96,17	56	84.490.000	97,47	56	171.360.930	97,98

1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		2	138.650.000	72,11	2	183.670.800	96,17	2	84.490.000	97,47	2	171.360.930	97,98
		Jumlah sarana air minum (DAM) memenuhi syarat kesehatan Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan													
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan													
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		100	477.661.100		100	822.547.527		100	1.580.293.021	94,51	100	1.596.701.798	88,96

1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12	263.112.500	90,94	12	468.937.500	99,68	12	253.251.400	99,45	12	328.888.100	96,37
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12	263.112.500	90,94	12	468.937.500	99,68	12	253.251.400	70,84	12	328.888.100	96,37
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota			10	214.548.600	90,94	10	353.610.027	99,57	10	515.793.621	99,69	10	579.115.939	83,02
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			12	214.548.600	90,94	12	353.610.027	99,57	12	347.449.621	99,54	12	384.187.439	76,44
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Daerah Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat			174 66			174 66			174 66	168.344.000	100,0 0	174 66	194.928.500	99,96

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			32	-		32	-	0,00	32	811.248.000	90,14	32	688.697.759	91,09
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10			10			12	811.248.000	90,14	12	688.697.759	91,09
				400	227.845.193.656	337,63	400	139.883.375.871	276,91	400	170.467.436.777	375,23	400	331.491.803.440	355,10

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Anggaran SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD MANDAU
 sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024

No	Sasaran	Sasaran (Baru)	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun ke-								Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2021		2022		2023		2024										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	Meningkatkan profesionalisme SDM	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit	98	16.943.318.359	93	97.388.405.446	15.615.898.712	94	98.229.642.475	15.750.740.860	95	99.707.966.004	16.007.593.057	96	101.111.457.069	16.212.441.018	93	137.891.383.650	25.224.150.584	94	187.366.216.388	20.391.142.840	95	166.598.877.481	17.835.048.512	96	143.419.901.456	12.459.218.620	100	162	100	129	100	111	100	77	RSUD Mandau
			Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk ukp dan ukn di wilayah kabupaten/kota	Persentase pembayaran jasa pelayanan sumber daya manusia kesehatan	100	16.943.318.359	100	15.615.898.712	100	15.750.740.860	100	16.007.593.057	100	16.212.441.018	100	25.224.150.584	100	20.391.142.840	100	17.835.048.512	100	12.459.218.620	100	162	100	129	100	111	100	77									
2	Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	96	52.914.798	91	48.769.203	92	49.190.321	93	49.992.483	100	50.623.233	100	24.040.000	-	-	-	-	-	110	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Pelaksanaan Schat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi dan Preventif Bidang Kesehatan	100	52.914.798	100	48.769.203	100	49.190.321	100	49.992.483	100	50.623.233	100	24.040.000	-	-	-	-	-	100	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	Terpenuhinya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standart		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit		9.035.919.268	78	8.482.148.882	79	8.555.686.859	80	8.571.669.491	100	8.808.905.247	76	19.456.552.295	77	41.241.040.506	78	23.790.840.201	100	7.164.494.943	97	229	97	482	98	278	100	81									
			Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit	100	9.035.919.268	100	8.482.148.882	100	8.555.686.859	100	8.571.669.491	100	8.673.905.247	100	19.456.552.295	100	41.241.040.506	100	23.790.840.201	100	7.164.494.943	100	229	100	482	100	278	100	83	Bidang Pelayanan								
4	Meningkatnya Manajemen Pelayanan		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	100	25.000.000	100	-	100	-	100	25.000.000	100	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Humas dan SDM					
			Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	100	150.000.000	100	-	100	-	100	100.000.000	100	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Humas dan SDM					

5	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan di rumah sakit	100	200.000.000	98	150.000.000	98	151.000.000	98	152.000.000	98	153.000.000					0	0													
		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	100	200.000.000	98	150.000.000	98	151.000.000	98	152.000.000	98	153.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kegiatan penunjang operasional kantor	100	79.695.443.819	93	73.241.588.649	94	73.874.024.435	95	75.078.710.973	95	76.039.487.571	100	93.186.640.771	100	125.734.033.042	100	124.972.988.768	339	123.796.187.893	108	127	106	170	105	166	356	163			Bagian Humas dan SDM
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN	100	950.000.000	##	385.000.000	100	443.000.000	##	605.500.000	100	625.000.000	100	404.003.141	100	926.408.644	100	698.091.659	-	-	100	105	100	209	100	115	-	-			Bagian Humas dan SDM
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100	28.984.943.819	##	28.067.588.649	100	28.126.024.435	##	28.215.710.973	100	28.488.487.571	100	30.782.362.435	100	32.060.309.388	100	38.797.881.259	100	44.004.184.973	100	110	100	114	100	138	100	154			
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna	100	1.350.000.000	##	1.039.000.000	100	1.050.000.000	##	1.100.000.000	100	1.180.000.000	100	1.217.325.000	100	1.189.650.000	100	1.152.650.000	-	-	100	117	100	113	100	105	-	-			
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	250.000.000	##	150.000.000	100	155.000.000	##	170.000.000	100	175.000.000	100	134.255.000	100	207.649.581	100	198.439.249	100	346.786.320	100	90	100	134	100	117	100	198			
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	100	2.820.000.000	##	2.250.000.000	100	2.455.000.000	##	2.460.500.000	100	2.506.000.000	100	2.111.978.034	100	2.238.052.521	100	2.666.147.307	0	2.615.118.511	100	94	100	91	100	108	-	104			
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas	100	3.150.000.000	##	2.850.000.000	100	2.935.000.000	100	3.000.000.000	100	3.010.000.000	100	3.584.257.582	100	5.132.953.669	100	1.946.232.513	100	1.112.854.726	100	126	100	175	100	65	100	37			
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor	100	1.540.500.000	##	1.350.000.000	100	1.187.000.000	##	1.500.000.000	100	1.510.000.000	100	2.057.896.500	100	3.033.081.186	100	-	-	-	100	152	100	256	100	-	-	-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor	100	950.000.000	##	150.000.000	100	168.000.000	##	527.000.000	100	695.000.000	100	462.588.726	100	320.220.000	100	136.000.000	-	-	100	308	100	191	100	26	-	-			
6	Meningkatnya tata kelola keuangan PPK-BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan operasioanal pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD	40	39.700.000.000	38	37.000.000.000	38	37.355.000.000	38	37.500.000.000	39	37.850.000.000	38	52.431.974.353	38	80.625.708.053	38	79.377.546.781	39	75.717.243.363	100	142	100	216	100	212	100	200			
					105.727.596.244	97.388.405.446	98.229.642.475	99.707.966.004	101.111.457.060	137.801.383.650	187.366.216.388	166.508.877.481	143.419.901.456	100	142	100	191	100	167	55	142											

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Anggaran SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BENGKALIS
 sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkulu dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024

Uraian Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan				Rata-rata	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.374.000	211.066.000	131.275.000	77.301.470	150.508.121	210.906.672	130.843.080	76.580.770	90,46	99,92	99,67	99,07	-54%	-49%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12.944.310										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.385.417.804	39.899.926.848	42.591.721.516	54.961.242.626	36.321.974.268	38.289.663.762	40.053.647.902	51.252.522.399	97,16	95,96	94,04	93,25	47%	41%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.010.900.000	1.020.900.000	1.024.325.000	1.010.900.000	1.007.350.000	1.012.185.000	1.002.225.000	755.425.000	99,65	99,15	97,84	74,73	0%	-25%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	213.500.000	109.040.000	6.112.000	99.926.000	204.240.000	106.755.685	5.800.000	99,93	95,66	97,91	94,90	-94%	-94%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		48.360.000	48.358.000	40.074.250		42.910.000		33.450.000		88,73	-	83,47		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.714.000	225.323.700	50.001.100		266.625.300	225.158.100	30.214.942		99,97	99,93	60,43			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		760.708.000	50.029.600	30.850.000		694.074.400	47.762.804	29.720.250		91,24	95,47	96,34		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		170.100.000	71.050.000	26.840.000		152.488.960	70.745.000	26.840.000		89,65	99,57	100,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		250.000.000	71.534.800	60.000.000		249.939.900		59.701.500		99,98	-	99,50		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.034.000	296.637.000	88.319.000	24.486.000	108.542.493	296.596.108	88.199.572	24.194.800	70,01	99,99	99,86	98,81	-84%	-78%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		27.408.700				26.417.000				96,38				
Pengadaan Mebel	175.700.000	180.005.000	60.875.000		174.473.000	179.524.000	60.496.800		99,30	99,73	99,38			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.148.890.000		100.000.000	50.000.000	4.861.681.805		98.000.000		94,42		98,00	-		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.339.100.000	1.347.100.000	1.330.300.000	1.336.583.675	1.309.700.000	1.335.600.000	1.304.600.000	1.119.180.000	97,80	99,15	98,07	83,73	-0,2%	-15%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.173.072.734	3.394.218.888	2.267.579.720	2.276.485.280	2.630.144.802	1.960.453.400	2.122.464.000	2.124.326.095	82,89	57,76	93,60	93,32	-28%	-19%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.114.150.000	1.118.050.000	1.323.425.000	1.089.500.000	1.019.625.000	1.089.500.000	1.300.400.000	720.525.000	91,52	97,45	98,26	66,13	-2%	-29%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	205.750.000	328.000.000	130.000.000	66.525.500	190.833.391	318.581.740	105.606.948	83,16	92,75	97,13	81,24	63%	59%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000				48.410.000				96,82		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.626.625.000		2.414.000.000	1.845.180.000	1.624.725.000		2.292.763.732	1.369.355.000	99,88		94,98	74,21	13%	-16%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.883.748.000		117.630.400		1.845.180.000		117.630.400		97,95		100,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	56.980.000.000	70.096.000.000	58.418.000.000	64.177.800.000	49.317.563.347	60.089.344.178	59.250.418.255	63.599.161.061	86,55	85,72	101,42	99,10	13%	29%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.650.000.000				8.492.782.274				98,18					
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		2.370.000.000	198.000.000	50.000.000		2.366.116.126	197.780.000	49.938.000		99,84	99,89	99,88		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		60.000.000				59.800.000				99,67				
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.078.665.127	13.354.443.132	510.748.299	1.095.218.632	12.947.004.180	12.196.145.391	365.437.500	1.068.360.000	91,96	91,33	71,55	97,55	-92%	-92%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				50.000.000				49.900.000				99,80		
Pengembangan Rumah Sakit				100.000.000				99.654.616				99,65		
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.050.880.550	9.287.000.000	4.000.000.000	1.985.144.836	7.782.383.073	9.064.026.185	3.884.135.342	1.799.908.116	96,66	97,60	97,10	90,67	-75%	-77%
Pemeliharaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	296.000.000	2.230.598.000	195.682.000		292.900.000	2.140.458.500	195.180.000		98,95	95,96	99,74			
Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	650.000.000	843.479.000	300.000.000		649.674.480	843.153.700	204.285.500		99,95	99,96	68,10			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	400.132.500	133.800.040	111.450.000		399.879.000	128.874.000	102.938.000		99,94	96,32	92,36			
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		354.561.000	119.928.000			272.494.866	60.666.000			76,85	50,59			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		423.130.360	449.476.510	27.134.800		423.130.360	439.558.800	25.721.200		100,00	97,79	94,79		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	21.193.750.000	19.638.513.752	18.693.572.124	12.231.145.690	20.928.154.180	18.905.208.529	16.949.482.705	9.404.025.500	98,75	96,27	90,67	76,89	-42%	-55%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		343.658.000	125.980.000	67.550.000		233.071.641	121.952.022	30.172.170		67,82	96,80	44,67		

Sumber: Data Sub Bagian Pembukuan RSUD Bengkalis, Desember 2024.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut ;

Tabel 2.7

Capaian Pelayanan SPM berdasarkan **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan** sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM											
		2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11971	11398	95,2	12.394	35.858	83,8	12.677	61.013	88,85	12.915	11.296	87,5
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11427	10486	91,8	11.831	33.836	82,2	12.099	57.848	82,82	12.328	9.940	80,6
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10883	10391	95,5	11.268	32.637	82,8	11.527	55.515	85,17	11.741	9.787	83,4
4	Pelayanan Kesehatan Balita	64087	33309	52,0	56.805	154.253	83,9	58.851	269.993	76,98	59.955	64.182	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	102680	83862	81,7	98.637	285.261	100	101.137	485.154	100	101.898	117.187	100
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	366866	95459	26,0	372.666	835.017	82,6	379.314	1.587.080	60,44	393.331	353.758	89,9
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	35157	28908	82,2	35.403	99.550	87,2	37.706	172.746	100	40.292	35.096	87,1
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	118620	55142	46,5	126.384	300.192	60,1	128.598	555.235	42,86	133.351	96.873	72,6
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7804	11325	100	8.315	27.589	100	8.460	44.479	100	8.774	19.180	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	890	118	13,3	936	1.957	51,5	953	3.898	68,84	988	718	72,7
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	9182	2024	22,0	9.681	20.909	77,2	13.423	44.090	100	10.342	12.863	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	13155	10123	77,0	13.598	36.953	93,4	14.160	64.804	100	13.994	16.244	100

Tabel 2.8
Capaian Pelayanan SPM berdasarkan **Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Bengkalis** sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR		TARGET PENCAPAIAN SPM DAERAH	REALISASI			
					2021	2022	2023	2024
1	Gawat Darurat	1	Jam buka pelayanan gawat darurat.	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		2	Kemampuan Menangani <i>Live Saving di IGD</i> .	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Pemberi pelayanan kegawat darurat yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD.	100%	8.3%	50.9%	40,19 %	58.86 %
		4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana.	1 tim	1 tim	-	-	1 tim
		5	Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat.	≤ 5 menit	≤ 2 menit	≤ 2 menit	≤ 2 menit	≤ 5 menit
		6	Kepuasan pelanggan.	80%	80%	100%	90.81 %	85.56 %
		7	Kematian pasien ≤ 24 jam di IGD.	≤ 2%	1.98 %	0.65%	0.02%	0.003 6%
		8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rawat jalan	1	Pemberi pelayanan di klinik spesialis.	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan.	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan.	100%	90%	95%	85%	88%
		4	Waktu tunggu di rawat jalan.	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
		5	Kepuasan pelanggan pada rawat jalan.	80%	85%	85%	85%	88%
		6	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS.	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Penegakan diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopi tuberkulosis.	≥ 60%	100%	100%	100%	100%
		8	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit.	≥ 60%	100%	100%	100%	100%
		9	Konseling KB mantap.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap.	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Dokter penanggung jawab pasien.	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Ketersediaan pelayanan Rawat Inap (Anak, Kebidanan, Dalam, Bedah, THT, Paru, Syaraf, Kulit kelamin, Mata, Patologi Klinik, Patologi anatomi, Radiologi, Rehabilitasi Medik).	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Jam visite dokter spesialis (jam visite dokter spesialis dilaksanakan paling lambat jam 09.00 WIB).	100%	100%	95,69 %	98,51 %	75%

		5	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian.	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Kematian > 48 jam.	≤ 0,24%	1.8%	1.62%	1,20%	0,01%
		7	Kejadian pulang paksa.	≤ 5%	0.55 %	2%	0%	0,07%
		8	Kepuasan pelanggan.	≥ 80%	88%	82.6%	≥80%	100%
		9	Pasien rawat inap tuberkulosis yang dilayani dengan strategi DOTS.	100%	100%	100%	100%	100%
		10	Penegakan diagnosis Tuberkulosis melalui pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis.	≥ 60%	100%	100%	100%	100%
		11	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit.	≥ 60%	100%	100%	100%	100%
4	Bedah sentral	1	Waktu tunggu operasi ≤ 1jam.	100%	37.92 %	29.60 %	63,50 %	64,17 %
		2	Kejadian kematian di meja operasi.	< 1%	0%	0%	0%	0%
		3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi.	≤ 1%	0%	0%	0%	0%
		4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang.	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi.	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi.	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Komplikasi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i> .	≤ 6%	0%	0%	0%	0%
5	Pelayanan persalinan	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan.	Pendarahan ≤ 67,8%	0%	0%	0%	0%
				Eklamsi ≤30%	0%	0%	0%	0%
				Sepsis ≤ 0,2%,	0%	0%	0%	0%
				Partus Lama ≤2%	0%	0%	0%	0%
		2	Pemberi pelayanan persalinan normal.	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit.	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi.	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Pelayanan persalinan melalui SC.	≤ 20%	62.1 %	65.4%	63,70 %	68,55 %
6	Pelayanan perinatologi	1	Kemampuan menangani BBLR 1500-2500 gram.	100%	79.6 %	100%	91,67 %	93,5%
7	Pelayanan Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%
		2	Pemberi pelayanan Intensif.	≥ 90%	100%	100%	90%	100%
		3	Tersedianya kasur dekubitus sesuai jumlah tempat tidur.	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Tersedianya alat penghangat darah (Animex) sesuai kapasitas tempat tidur 5.	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tersedianya set ganti balut sesuai jumlah tempat tidur.	100%	50%	50%	100%	100%

		6	Tersedianya <i>infuse pump</i> sesuai kapasitas tempat tidur.	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Tersedianya <i>Ventilator</i> sesuai kapasitas tempat tidur.	100%	80%	60%	50%	66,7%
		8	Tersedianya <i>Syringe Pump</i> (tersedia 2 <i>Syringe Pump</i> untuk masing-masing tempat tidur).	100%	40%	100%	100%	87,5%
8	Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto <i>thorax</i> .	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam
		2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan <i>rontgen</i> .	100%	13%	38%	100%	100%
		3	Kejadian kegagalan pelayanan <i>rontgen</i> .	≤ 2%	2%	< 2%	≤ 2%	≤ 2%
		4	Kepuasan pelanggan.	≥ 80%	90.32 %	≥ 80%	84%	100%
9	Laboratorium	1	Waktu tunggu hasil Pelayanan laboratorium maksimal 120 menit.	≥ 90%	98.92 %	98.90 %	99.8%	96.98 %
		2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium dokter Spesialis Patologi Klinik.	100%	100%	99.4%	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium.	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan.	≥ 80%	80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
10	Patologi anatomi	1	Waktu tunggu hasil Pelayanan laboratorium maksimal dua hari.	≥ 90%	31%	46%	50%	50%
		a. Pemeriksaan Cytopatologi (FNAB,Citologi, Papsmear						
		b. Pemeriksaan Histopatologi						
		2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium dokter Sp. PA.	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan patologi anatomi.	100%	100%	100%	100%	100%
11	Rehabilitasi Medik	1	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan.	≤ 50%	1.64 %	3.44%	1%	1,21%
		2	Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik.	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kepuasan Pelanggan.	≥ 80%	98.29 %	96.38 %	96%	98,83 %
12	Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi < 30 menit.	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit.	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan pemberian obat.	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan.	≥ 80%	99%	97.90 %	95,33 %	98%
		5	Penulisan resep sesuai formularium.	≥ 80%	95%	96.40 %	95,4%	97%
13	Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien.	≥ 90%	100%	100%	100%	100%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien.	≤ 20%	9.03 %	2.18%	4,5%	9,44%
		3	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet.	100%	100%	100%	100%	100%

14	Unit Transfusi Darah	1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi.	100%	94%	96%	94%	89%
		2	Kejadian reaksi tranfusi.	≤ 0,01%	0.1%	0.4%	0,3%	0,30%
15	Rekam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan.	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kelengkapan <i>informed consent</i> setelah mendapatkan informasi.	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤5 menit.	≥ 90%	≥ 90%	≥90%	≥90%	≥90%
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap ≤ 15 menit.	≥ 80%	85%	85%	85%	≥85%
16	Pelayanan Pasien Miskin	1	Pelayanan terhadap Pasien Miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani
17	Pengolahan limbah	1	Baku mutu limbah cair:	100%	100%	89%	50%	100%
			BOD	< 30 mg/l				
			COD	< 80 mg/l				
			TSS	< 30 mg/l				
			pH	6-9				
		2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai aturan.	100%	100%	100%	100%	100%
18	Administrasi manajemen	1	Tidak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi.	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari
		2	Kelengkapan waktu laporan akuntabilitas kinerja.	≤ 3 bulan	2 minggu	< 2 minggu	< 2 minggu	≤ 3 bulan
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat.	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala.	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun.	≥ 80%	80%	≤ 80%	≤ 80%	≤ 80%
		6	<i>Cost recovery.</i>	40%	33.29 %	44%	43.19 %	47,80 %
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan setiap tanggal 10.	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pada pasien rawat inap.	2 jam	≤1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu.	> 60%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
19	Pelayanan ambulance/ kereta jenazah	1	Waktu pelayanan <i>ambulance jenazah</i> 24 jam.	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di Rumah Sakit ≤ 30 menit.	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 90%

20	Pemulasaran jenazah	1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah ≤ 2 jam.	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
21	Pelayanan Laundry	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang.	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kecepatan waktu penyediaan linen Rumah Sakit < 24 jam.	$\geq 80\%$	90%	$\geq 93\%$	100%	$\geq 85\%$
22	Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat.	$\geq 80\%$	85%	80%	97%	75%
		2	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.	100%	100%	100%	100%	95%
23	Pencegahan & Pengendalian Infeksi	1	Ada anggota TIM PPI yang terlatih.	$\geq 75\%$	100%	100%	100%	100%
		2	Tersedia APD di setiap instalasi.	$\geq 60\%$	100%	100%	100%	100%
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (<i>Health care associated infection</i>) di RS.	$\geq 75\%$	100%	100%	100%	100%
		4	Kejadian infeksi paska operasi.	$\leq 1,5\%$	0%	0%	0%	0%
		5	Angka kejadian infeksi nosokomial.	$\leq 1,5\%$	0%	0%	0%	0%
		6	Angka kejadian luka decubitus	$\leq 2\%$	0%	0%	0%	0%
		7	Angka kejadian flebitis	$\leq 2\%$	0.96 %	0.63%	0,00%	0.061 %
24	Pelayanan keamanan	1	Anggota satuan pengaman yang terlatih.	100%	90%	90%	100%	95%
		2	Tidak ada pengaduan kehilangan dari pasien/keluarga pasien.	100%	100%	90%	90%	90%
		3	Kepatuhan kontrol ke setiap ruangan dan lingkungan Rumah Sakit.	100%	100%	90%	94%	85%

Tabel 2.9
Capaian Pelayanan SPM berdasarkan **Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Mandau** sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Capaian		
			2022	2023	2024
IGD					
1	Kemampuan Menangani life saving anak dan dewasa.	100%	73%	80%	80%
2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS / PPGD / GELS / ALS	100%	48%	62%	48%
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	4 menit	4 menit	4 menit
6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	70%	70%	70%
7	Kematian pasien< 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0	0	0
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%
9	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%	100%	100%
10	Ketersediaan Pelayanan	Klinik Anak, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan, Klinik Bedah	Tersedia	Tersedia	Tersedia
11	Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 - 11.00	100%	100%	100%
12	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	74 menit	83 menit	≤ 60 menit
13	Kepuasan Pelanggan	> 90 %	81%	90%	92%
14	Penegakan diagnosis TB melalui Pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	50%	69%	87%
15	Terlaksananya bagian pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60 %	88%	69%	100%
RAWAT INAP					
1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. Dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Kesehatan anak, Penyakit dalam, kebidanan, dan bedah	Tersedia	Tersedia	Tersedia

4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0	0	0
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	0	0	0
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%	100%	100%	100%
8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	0	0,03	0,04
9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	1	1,26	0
10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	98%	98%	95%
11	Rawat Inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS	≥ 60 %	97%	99%	100%
12	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60 %	94%	94%	100%
BEDAH SENTRAL					
1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	0	0	0
2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	0	0	0
3	Tidak adanya kejadian operasi salah insisi	100%	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	0	0	0
PERSALINAN, PERINATOLOGI DAN KB					
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1 %, Pre-eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0,2 %	0	0	0
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (dokter Sp.OG, Dokter umum terlatih, Bidan)	100%	100%	100%	100%
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	80%	61%	75%
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	39%	51%	55%
7	Keluarga Berencana : Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	100%	100%	100%	100%
8	Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	100%	100%
9	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	98%	91%	91%

INTENSIF					
1	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0	0	0
2	Pemberi pelayanan unit intensif	100 %Dokter spesialis anestesi sesuai dengan kasus yang ditangani, 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara (D4)	100%	100%	100%
			30%	79%	80%
RADIOLOGI					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	42 menit	42 menit	42 menit
2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad
3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	0,7	0%	0%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	99%	86%	94%
LABORATORIUM					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	113 menit	98 menit	98 menit
2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	99%	86%	86%
REHABILITASI MEDIK					
1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %	0%	0,44%	0,44%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%
3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	95%	99%	99%
FARMASI					
1	Waktu tunggu pelayanan : Obat Jadi	≤ 30 menit	39 menit	47 menit	52 menit
2	Racikan	≤ 60 menit	71 menit	73 menit	67 menit
3	Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	97%	86%	96%
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	98%	100%
GIZI					
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	97%	95%	96%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	9%	13%	15%
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%
TRANSFUSI DARAH					
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	96%	88%	100%

2	Kejadian Reaksi transfusi	≤ 0,01 %	0,13%	0%	0,68%
PELAYANAN GAKIN					
1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100%	100%
REKAM MEDIK					
1	Kelengkapan pengisian rekam medik <24 jam setelah selesai pelayanan	100%	65%	100%	100%
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	82%	85%	100%
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	8 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	14 menit	5,25 menit	5,25 menit
PENELOLAHAN LIMBAH					
1	Baku mutu limbah cair	BOD < 30 mg/l, COD < 80 mg/l TSS < 30 mg/l PH 6-9	24.75 mg/ l 48 mg/l 25.58 mg/l 6.9 mg/l	13 mg/ l 42 mg/l 13 mg/l 7 mg/l	2 mg/ l 7 mg/l 6 mg/l 8 mg/l
2	Pengelolaan Limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN					
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	95%	95%
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat (per 6 bulan)	100%	100%	100%	100%
4	Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	8%	5%	5%
6	Cost recovery	≥ 40 %	100%	100%	100%
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	24 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	≤ 2 jam	100%	100%	100%
AMBULANCE/KERETA JENAZAH					
1	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	24 jam	2 jam	2 jam
PEMULASARAN JENAZAH					
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	29 menit	1 Jam	1 Jam
PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT					
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	> 80 %	86%	90%	95%
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	87%	87%	83%

3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	92%	100%	100%
PELAYANAN LAUNDRI					
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	80%	85%	75%
1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	67%	100%	85%
2	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	60%	97%	95%
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	100%	93%	98%
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)			82,00%	87%	90%

d. Kelompok Sasaran Layanan

Program-program yang tersaji pada Dinas Kesehatan merupakan program prioritas daerah yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program untuk masing-masing program prioritas ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan daerah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan – kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang kesehatan. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah masyarakat dan perangkat daerah yang berkolaborasi dalam penanganan masalah kesehatan, Kelompok sasaran perangkat daerah yang dimaksudkan adalah semua sektor yang mendukung tujuan pemerintah daerah yaitu mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan gender dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Sosial
3. Dinas PPKBP3A
4. Dinas DUKCAPIL
5. Dinas PMD
6. BPKAD
7. BAPPELITBANGDA
8. Dinas Komunikasi dan Informasi
9. Badan Ketahanan Pangan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.10
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

NO	BIDANG	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PELAYANAN KESEHATAN	1.1 Kurangnya kualitas pelayanan kesehatan dan pembiayaan/jaminan kesehatan masyarakat	1.1.1 Pelayanan kesehatan belum sesuai standar	1.1.1.1 Kurangnya pemerataan distribusi tenaga kesehatan
				1.1.1.2 Keterbatasan sarana dan prasarana
			1.1.2 Masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan	1.1.2.1 Data Kependudukan atau NIK yang tidak valid, sehingga tidak bisa dilakukan pendaftaran peserta JKN
				1.1.2.1 Banyaknya peserta JKN yang di non aktifkan dan tidak melanjutkan kepesertaan pada segmen lain

			1.1.3 Banyaknya peserta JKN yang di non aktifkan dan tidak melanjutkan kepesertaan pada segmen lain	1.1.3.1 Rendahnya pendapatan iuran (menunggak dan tunda bayar)
				1.1.3.2 Peningkatan jumlah peserta untuk penyakit degeneratif
				1.1.3.3 Tingginya biaya pelayanan kesehatan di Rumah sakit
			1.1.4 Rendahnya kesadaran masyarakat akan jaminan kesehatan	1.1.4.1 Masyarakat kurang memahami manfaat dan pentingnya jaminan kesehatan, termasuk prosedur pendaftaran JKN
		1.2 Belum optimalnya pelaksanaan sistem rujukan	1.2.1 Pelayanan Rujuk Balik yang masih rendah	1.2.1.1 Keterbatasan obat di FKTP
				1.2.1.2 Rendahnya kepercayaan pasien terhadap fasyankes dan belum memahami sistem rujukan
				1.2.1.3 Keterbatasan ketersediaan dokter ahli
		1.3 Belum optimalnya Kualitas layanan	1.3.1 Sistem informasi kesehatan (RME) yang belum optimal	1.3.1.1 Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi kesehatan
				1.3.1.2 Sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh
2	SUMBER DAYA KESEHATAN	2.1 Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kefarmasian	2.1.1 Belum baiknya manajemen SDM Kesehatan	2.1.1.1 Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan
				2.1.1.2 Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata
				2.1.1.3 Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan yang kurang optimal
			2.1.2 Belum meratanya akses pelayanan kesehatan sesuai standar	2.1.2.1 Belum terpenuhinya bangunan Puskesmas/ puskesmas pembantu/Pokesdes sesuai standar
				2.1.2.2 Belum terpenuhinya prasarana Puskesmas/ puskesmas pembantu/Pokesdes sesuai standar
				2.1.2.3 Belum terpenuhinya alat kesehatan di Puskesmas/ jaringannya sesuai standar
				2.1.2.4 Belum terpenuhinya Mobil Ambulan Darat dan Laut serta Kendaraan operasional program di Puskesmas sesuai standar
				2.1.2.5 Belum tersedianya Laboratorium Kesehatan di Kabupaten
				2.1.2.6 Belum terpenuhinya Rumah Sakit Pratama di Daerah Terpencil dan Terpencil dan Perbatasan
				2.1.2.7 Belum terpenuhinya IPAL di Puskesmas sesuai standar (hanya 2 pusk)

				2.1.2.8 Belum terpenuhinya tempat penampungan limbah sementara di Puskesmas
				2.1.2.9 Belum terpenuhinya pencatatan dan pemeriharaan alat kesehatan di Puskesmas/ jaringannya sesuai standar
				2.1.2.10 Belum terpenuhinya kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
				2.1.2.11 Pengadaan tanah untuk bangunan kesehatan
			2.1.3 Belum baiknya sistem manajemen obat dan BMHP yang baik dan benar	2.1.3.1 Belum terpenuhinya bahan habis pakai di Puskesmas/jaringannya
				2.1.3.2 Belum adanya kesesuaian antara perencanaan, kebutuhan dan pengadaan obat
3	KESEHATAN MASYARAKAT	3.1 Tingginya balita stunting, kasus kematian Ibu dan Bayi	3.1.1 Rendahnya kualitas Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta pemerataan pelayanan kesehatan	3.1.1.1 Belum standar pelayanan kesehatan bayi
				3.1.1.2 Masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun bayi
				3.1.1.3 Belum Optimalnya deteksi dini Resiko Tinggi pada kehamilan
				3.1.1.4 Belum optimalnya pelayanan Kesehatan Ibu dan anak melalui jejaring Unit Tranfusi Darah (UTD) antar Rumah sakit
				3.1.1.5 Masih dijumpai catin yang tidak melakukan Skrining pelayanan Kesehatan Reproduksi
				3.1.1.6 Kurang nya Sarana dan Prasarana Kegawatdaruratan Neonatus sehingga kualitas tatalaksana kegawatdarutan neonatus belum optimal
				3.1.1.7 Tingginya kasus kematian bayi karena Bayi Berat Badan Lahir Rendah dan Asfiksia
				3.1.1.8 Rendahnya cakupan Asi Eksklusif
				3.1.1.9 Kurang optimal nya Integrasi Program KIA dan Gizi
				3.1.1.10 Pelayanan gizi dan pelayanan ibu-anak sering berjalan terpisah dan tidak terkoordinasi
				3.1.1.11 Keterbatasan akses layanan laboratorium untuk pemeriksaan status gizi (Hb, status mikronutrien)
				3.1.1.12 Posyandu dan Puskesmas kekurangan alat pemantauan gizi dan pertumbuhan (misalnya timbangan bayi, alat pengukur panjang badan, alat skrining anemia)

			3.1.2 Rendahnya peran serta masyarakat dan kualitas sanitasi dasar	3.1.2.1 Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di tingkat UKK dan UKBM
				3.1.2.2 Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berPHBS
				3.1.2.3 Rendahnya peran serta masyarakat disebabkan budaya dan kebiasaan yang tidak mendukung berperilaku hidup bersih dan sehat
				3.1.2.4 Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan lansia
				3.1.2.5 Kurangnya pemicuan Masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku dan meningkatkan sanitasi yang layak , Masih rendahnya capaian STBM di Pilar 4 & 5
				3.1.2.6 Akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak masih menjadi masalah di Tempat Fasilitas Umum (TFU)
				3.1.2.7 Belum tercapainya pemeriksaan kualitas air minum layak dan sesuai standar
				3.1.2.8 Masih rendahnya capaian indikator Kabupaten Sehat
				3.1.2.9 Masih rendahnya capaian indikator Kabupaten Sehat
				3.1.2.10 Masih banyaknya Tempat Pengolahan Makanan yang tidak bersertifikat (Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat keamanan pangan)
4	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4.1 Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular	4.1.1 Belum Optimalnya Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.1.1.1 Masih rendahnya cakupan penemuan kasus baru TB Paru
				4.1.1.2 Masih rendahnya cakupan penemuan kasus kasus HIV
				4.1.1.3 Masih tingginya Insiden Rate (IR) kasus DBD, ISPA (Pneumonia), Hepatitis pada Ibu Hamil, Diare pada Balita
				4.1.1.4 Masih tingginya prevalensi penyakit kecacingan pada anak sekolah
				4.1.1.5 Masih ditemukan kasus Malaria Indigeneus baru
				4.1.1.6 Masih ditemukaannya kasus baru Filariasis
				4.1.1.7 Tebatasnya ketersediaan logistik untuk program penyakit menular dan tidak menular
				4.1.1.8 Masih ada penderita Kusta yang putus berobat
				4.1.1.9 Masih rendahnya cakupan Triple Eliminasi (pemeriksaan HIV, IMS dan Hepatitis) pada Ibu Hamil

			4.1.1.10 Masih tingginya stigma terhadap kasus ODGJ
		4.1.2 Tidak dilakukannya lagi pemeriksaan Rapid Test dan Pemeriksaan PCR pada kasus terduga Covid-19	4.1.2.1 Belum ada regulasi baru terhadap penanganan kasus terduga Covid-19
		4.1.3 Belum optimalnya Pelaksanaan Surveilans, SKD-KLB, Penanganan Wabah/KBL dan Program Imunisasi	4.1.3.1 Masih optimal Surveilans PD3I dan penyakit yang berpotensi KLB/Wabah
			4.1.3.2 Masih rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
			4.1.3.3 Kurangnya sosialisasi Promosi Kesehatan terkait pemberian vaksin ke Masyarakat
			4.1.3.4 Belum Optimalnya pelaksanaan Manajemen Logistik (Vaksin, alat suntik, dan Cold Chain) Sesuai dengan Standar yang dilakukan oleh daerah

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Bengkalis

Tabel 2.11
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
RSUD Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan pelayanan belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.	Perencanaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Bengkalis belum terlaksana dengan baik.
			Monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) terkait pelayanan farmasi belum terlaksana dengan baik.
		Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan kesehatan.	Monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) belum mencapai target yang telah ditetapkan.
		Belum terwujudnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan spesialistik, khususnya untuk kasus prioritas seperti Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).	Adanya ketimpangan kapasitas sistem kesehatan antar wilayah meliputi keterbatasan dan ketidakmerataan SDM spesialis, fasilitas, serta pembiayaan, sehingga layanan spesialistik prioritas (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, KIA) tidak dapat diberikan secara merata dan bermutu.
2	Sarana, prasarana dan alkes belum terpenuhi sesuai standar	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit kelas B.	Perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alkes belum sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan ASPAK.

		Pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes belum optimal.	Inventarisasi sarana, prasarana dan alkes yang belum berjalan dengan efektif sehingga menyulitkan pada proses pemeliharaan dan kalibrasi alkes.
3	Pengelolaan SDM belum optimal	Perlunya Peningkatan kompetensi SDM terutama terkait layanan unggulan.	Pengadaan alat-alat canggih dan ditetapkannya layanan unggulan di unit pelayanan tidak seiring dengan peningkatan kompetensi SDM.
		Sistem <i>reward</i> dan punishment belum terlaksana dengan baik.	Pemberian penghargaan ataupun punishment dari hasil evaluasi kinerja pegawai belum dilaksanakan secara optimal, sehingga mempengaruhi tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja.
		Belum sinkronnya rencana pengembangan SDM di bagian diklat dengan anggaran yang tersedia.	Anggaran yang tidak memadai mengakibatkan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
		Penempatan SDM yang belum sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan.	Proses mutasi dan penempatan pegawai di unit-unit pelayanan belum dikelola secara optimal sehingga masih ditemukan pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya.
4	Pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan alat-alat canggih belum optimal	Masih kurangnya promosi dan pemasaran pelayanan unggulan dan ketersediaan alat-alat canggih.	Informasi yang diterima masyarakat terkait jenis layanan yang tersedia termasuk layanan unggulan masih belum optimal, hal ini disebabkan masih rendahnya koordinasi dan integrasi fungsi pemasaran dengan fungsi pelayanan dalam rangka merancang, mengkomunikasikan, menentukan harga, dan menghasilkan produk layanan kesehatan.
5	Pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SIM RS.	Penyelenggaraan SIM RS di RSUD Bengkalis belum optimal karena belum tersedianya unit kerja fungsional dengan sumber daya Manusia yang kompeten dan terlatih sehingga penyelenggaraan SIM RS dari unsur keamanan secara fisik, jaringan dan sistem aplikasi belum tercapai, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
6	Tata kelola keuangan PPK-BLUD belum optimal.	Kebijakan terkait implementasi PPK-BLUD Masih kurang.	Pelaksanaan PPK-BLUD belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan BLUD.
		Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi SDM dalam implementasi kebijakan BLUD.	Penempatan SDM belum sesuai dengan kompetensi/ <i>basic education</i> .
		Sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam penatausahaan keuangan walaupun sudah mencukupi namun belum semua memahami prinsip PPK-BLUD.	Beberapa SDM belum pernah mengikuti pelatihan dan bimtek tentang PPK-BLUD.
		Masih adanya keterlambatan penyampaian RBA.	Keterlibatan bidang/bagian terkait dalam penyusunan anggaran belum maksimal.
7	Pengelolaan Fungsi RSUD Bengkalis sebagai RS Pendidikan belum terlaksana dengan baik	RSUD Bengkalis telah menyelenggarakan proses Pendidikan di bidang kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya tapi belum ada penetapan RS Pendidikan pada RSUD Bengkalis.	Belum ada regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah yang menaungi RSUD Bengkalis untuk menyelenggarakan proses Pendidikan di bidang kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.
		Adanya perubahan borang penilaian dari Kementerian Kesehatan.	Borang penilaian baru belum terbit.

		Sumber daya yang dimiliki RSUD Bengkalis untuk penyelenggaraan proses pendidikan kesehatan belum memadai.	Belum tersedianya SDM Ahli, anggaran, ruang dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan proses pendidikan kesehatan.
--	--	---	--

c. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Mandau

Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Pelayanan Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.	Perencanaan obat di Instansi Farmasi RSUD Kecamatan Mandau belum terlaksana dengan baik.
			Monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan (SPM) terkait pelayanan farmasi belum terlaksana dengan baik
		Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan kesehatan.	Monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) belum mencapai target yang telah ditetapkan;
2	Sarana, prasarana dan alkes belum terpenuhi sesuai standar	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.	Perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alkes belum sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan ASPAK.
		Pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes belum optimal.	Inventarisasi sarana, prasarana dan alkes yang belum berjalan dengan efektif sehingga menyulitkan pada proses pemeliharaan dan kalibrasi alkes.
3	Pengelolaan SDM belum optimal	Perlunya Peningkatan kompetensi SDM terutama terkait layanan unggulan.	Pengadaan alat-alat canggih dan ditetapkannya layanan unggulan di unit pelayanan tidak seiring dengan peningkatan kompetensi SDM.
		Sistem reward dan punishment belum terlaksana dengan baik.	Pemberian penghargaan ataupun <i>punishment</i> dari hasil evaluasi kinerja pegawai belum dilaksanakan secara optimal, sehingga mempengaruhi tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja.
		Belum Sinkronnya Rencana Pengembangan SDM di bagian Diklat dengan anggaran yang tersedia.	Anggaran yang tidak memadai mengakibatkan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
		Penempatan SDM yang belum sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan.	Proses mutasi dan penempatan pegawai di unit-unit pelayanan belum dikelola secara optimal sehingga masih ditemukan pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya.

4	Pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan alat-alat canggih belum optimal	Masih kurangnya promosi dan pemasaran pelayanan unggulan dan ketersediaan alat-alat canggih.	Informasi yang diterima masyarakat terkait jenis layanan yang tersedia termasuk layanan unggulan masih belum optimal, hal ini disebabkan masih rendahnya koordinasi dan integrasi fungsi pemasaran dengan fungsi pelayanan dalam rangka merancang, mengkomunikasikan, menentukan harga, dan menghasilkan produk layanan kesehatan.
5	Pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SIM RS.	Penyelenggaraan SIM RS di RSUD Kecamatan Mandau belum optimal karena belum tersedianya unit kerja fungsional dengan sumber daya Manusia yang kompeten dan terlatih sehingga penyelenggaraan SIM RS dari unsur keamanan secara fisik, jaringan dan sistem aplikasi belum tercapai, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
6	Tata kelola keuangan PPK-BLUD belum optimal.	Kebijakan terkait implementasi PPK BLUD Masih kurang.	Pelaksanaan PPK BLUD belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan BLUD.
		Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi SDM dalam implementasi kebijakan BLUD.	Penempatan SDM belum sesuai dengan kompetensi/basic education
		Sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam penatausahaan keuangan walaupun sudah mencukupi namun belum semua memahami prinsip PPK BLUD.	Beberapa SDM belum pernah mengikuti pelatihan dan bimtek tentang PPK BLUD.
		Masih adanya keterlambatan penyampaian RBA.	Keterlibatan bidang/bagian terkait dalam penyusunan anggaran belum maksimal.

d. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkalis

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2025-2029. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah “**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia**”

Penjelasan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. **Bermarwah**, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. **Maju**, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
3. **Sejahtera**, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik
4. **Unggul**, Bermakna : Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan

Visi BENGKALIS 2025-2029: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA										
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	URUSAN	MASALAH	PROGRAM	INDIKATOR
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Memperkuat Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan seluruh masyarakat.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1) Belum semua penduduk dapat mencangkau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer), terutama wilayah terpencil, pulau, pesisir dan pinggiran hutan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu
								2) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer) pada semua wilayah kecamatan belum tersedia sesuai dengan standar pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Prevelansi Stunting (PendeK dan Sangat PendeK) pada Balita
								3) Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar pelayanan kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
								4) Cakupan pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder) belum merata pada semua wilayah	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan

								kecamatan, terutama wilayah terpencil, pulau, pesisir dan pinggiran hutan		Makanan dan Minuman
								5) Standar pelayanan kesehatan rujukan belum merata dan belum optimal pada semua tingkatan fasilitas kesehatan dan wilayah kecamatan dan desa		Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan
								6) Pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular masih belum optimal		
								7) Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk belum merata pada semua wilayah kecamatan		
								8) Pengetahuan pemanfaatan atau konsumsi pangan bergizi belum merata pada setiap wilayah kecamatan		
								9) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penerapan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih belum maksimal.		

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka yang menjadi penekanan pada Misi ke-1 yakni **"Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing"** dengan tujuan Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah dengan salah satu sasarannya adalah **meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

1. Faktor Penghambat :
 - a) Belum terintegrasinya data kesehatan. Berbagai sistem aplikasi dan pelaporan yang ada di Dinas Kesehatan, FKTP, FKTL dan stake holder belum terintegrasi sehingga sering terjadi adanya data yang ganda.
 - b) Belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan. Belum meratanya sarpras kesehatan menyebabkan masyarakat belum semua mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.
 - c) Adanya disparitas kuantitas kualitas dan sebaran SDM Kesehatan Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan yang bermutu dalam dapat menjangkau seluruh wilayah
2. Faktor Pendorong :
 - a) Adanya dukungan pembiayaan insentif bagi nakes. Pemberian insentif bagi nakes menimbulkan dampak motivasi yang tinggi bagi nakes layanan kesehatan.
 - b) Adanya SOP untuk mendukung organisasi. Adanya SOP membuat adanya standarisasi pelayanan dan mutu kesehatan
 - c) Adanya koordinasi dan kekompakan Tim.
 - d) Adanya Program JKN. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan memadukan berbagai upaya Bangsa

Indonesia dalam guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. JKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan.

e. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Telaah Kesesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Tabel 2.14
Tantangan Permasalahan secara global
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

No	Kategori	Tantangan Permasalahan
(1)	(2)	(3)
1	Ibu hamil	Tingkat kematian ibu hamil tertinggi ke-2 di Asia Tenggara >70% Tingkat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil terendah ke-4 di ASEAN 28 % ibu hamil memiliki risiko komplikasi
2	Bayi dan anak-anak	Angka kematian balita tertinggi ke-3 di Asia Tenggara 22% anak mengalami stunting 3x lipat dari rata-rata OECD 1 dari 5 anak usia sekolah obesitas
3	Remaja	>1/3 remaja perempuan mengalami anemia 1 dari 4 remaja menderita gangguan kesehatan mental 45 % perokok mulai merokok pada usia 15 tahun
4	Dewasa	Prevalensi TB tertinggi kedua didunia Insiden kusta tertinggi ke-3 didunia Kelompok usia produktif memiliki risiko NCD tinggi (e.g.stroke,diabetes,etc)
5	Lansia	1/3 populasi diprediksi akan menjadi lansia pada tahun 2050 Hanya 13 % lansia Indonesia sehat dan dapat menjalankan aktivitas Prevalensi rata-rata demensia > 25 %
6	Umum	>30% masyarakat memiliki keterbatasan akses informasi kesehatan 23% masyarakat Indonesia kurang beraktifitas fisik

Tabel 2.15

Telaah Kesesuaian Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Visi Kemenkes : Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup			
	1. Usia Harapan Hidup Sehat	1.1 Meningkatnya Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia	
			1.1.1 Angka Angka Kematian Ibu
			1.1.2 Angka kematian Balita
			1.1.3 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)
			1.1.4 Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60)
			1.1.5 Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
			1.1.6 Prevalensi Depresi di umur $\geq$ 15 tahun
			1.1.7 Kabupaten/Kota yang yang mencapai target kekebalan kelompok (%)
			1.1.8 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular
			1.1.9 Angka Populasi Bebas Penyakit Menular
		1.2 Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat	
			1.2.1 Persentase Penduduk dengan Literasi Kesehatan
			1.2.2 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup
			1.2.3 Kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
			1.2.4 Prevalensi obesitas >18 tahun
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau			
	2. Cakupan Layanan Kesehatan Esensial	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	
			2.1.1 . Persentase Kab/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
			2.1.2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
			2.1.3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna
			2.1.4 . Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Kesehatan
			2.1.5 Persentase Belanja Kesehatan Out of Pocket
			2.1.6 Persentase Masyarakat memiliki Asuransi Kesehatan Aktif

			2.1.7 Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif			
	3. International Health Regulations (IHR) score	3.1 Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan	
			3.1.1 Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri
			3.1.2 Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri
			3.1.3 Indeks Alat Kesehatan memenuhi Standar
			3.1.4 Nilai Kapasitas IHR dalam JEE
			3.1.5 Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan			
	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat	4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	
			4.1.1 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan mencapai target Tahunan Pembangunan
			4.1.2 Pengeluaran Kesehatan Total per Kapita
			4.1.3 Skala investasi di sektor kesehatan
5. Teknologi Kesehatan yang Maju			
	Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional	5.1 Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	
			5.1.1 . Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional
			5.1.2 Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN
			5.1.3 Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan
			5.1.4 Peningkatan Kapabilitas Uji Klinik di Indonesia
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien			
	Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan	6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	
			6.1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementrian Kesehatan

f. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan berbagai isu serta kebijakan kesehatan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis.
2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan Kabupaten Bengkalis lainnya.
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target- target pembangunan Kabupaten Bengkalis di berbagai bidang.
4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kabupaten Bengkalis.
5. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kabupaten Bengkalis.
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan kesehatan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, serta dengan memperhatikan isu-isu global urusan kesehatan, terdapat beberapa isu penting di Kabupaten Bengkalis yang harus mendapat perhatian lebih untuk segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis maka dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah antara lain :

1. Tingginya angka Kematian Ibu
2. Tingginya angka Kematian Bayi
3. Tingginya Kejadian Stunting
4. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
5. Biaya, akses dan kualitas layanan yang masih kurang optimal dan tidak merata diberbagai daerah
6. Distribusi nakes dan fasyankes yang belum merata , khususnya di daerah yang terpencil
7. Pendanaan dan Belanja Kesehatan yang masih belum optimal
8. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Tidak Menular
9. Minimnya inovasi dan teknologi Kesehatan
10. Masyarakat memiliki keterbatasan akses informasi kesehatan
11. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penerapan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih belum maksimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi di daerah. Pada Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten bertujuan untuk **Pengelolaan SDM Daerah yang Berdaya Saing Dan Berkarakter** dengan Indikator Tujuan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** pada **Tabel 3.1**

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Pernyataan tujuan selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai seperti yang telah dijabarkan pada **Tabel 3.1**

3.3 STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025-2029 untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata menyusun strategi untuk dilaksanakan sesuai Misi Rencana Strategis telah dijabarkan pada **Tabel 3.1**

3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan, secara adil dan merata dengan arah kebijakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia				
Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas/Mutu Pelayanan Kesehatan dan pembiayaan kesehatan.	1. Peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan	1. Meningkatkan Puskesmas BLUD	
			2. Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi	
			3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.	
			4. Meningkatkan Jaminan Kesehatan kepada Seluruh Masyarakat	
			5. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional.	
		2. Peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan	
			2. Meningkatkan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	
			3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan.	
		2. Menurunnya kasus penyakit menular dan tidak menular	1. Peningkatan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar.
				2. Meningkatkan Penanggulangan KLB/Wabah Penyakit sesuai standar
	3. Meningkatkan Surveilans Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.			
	3. Meningkatnya fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian sesuai standar	1. Peningkatan Pemerataan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan sesuai standar	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan : Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.	
			2. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar : Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes.	
			3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.	
		2. Peningkatan sistem manajemen obat dan BHP, pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Optikal dan UMOT serta PP-IRTP.	1. Meningkatkan Pelayanan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	
			2. Meningkatkan ketersediaan Obat, Vaksin, BHP.	
			3. Meningkatkan Pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Optikal dan UMOT serta PP-IRTP.	
		3. Peningkatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan esensial, perbaikan Gizi Masyarakat dan Akses sanitasi Dasar	1. Meningkatkan Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Lanjut sesuai standar.	
			2. Meningkatkan Penanganan Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting sesuai standar.	
			3. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	
			4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup puskesmas.	
			5. Meningkatkan akses Sanitasi Dasar Masyarakat yang layak	
		4. Peningkatan kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan	1. Peningkatan kualitas kinerja pegawai dan manajemen keuangan yang akuntabel.	1. Meningkatkan Manajemen Administasi Umum dan Kepegawaian serta Pengelolaan Keuangan
				2. Meningkatkan pencapaian kinerja perangkat daerah yang akuntabel.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis, maka disusunlah program-program Dinas Kabupaten Bengkalis untuk rentang waktu 2025-2029. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta mencapai tujuan pembangunan Kesehatan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan pada rencana strategi Dinas Kesehatan yang telah disusun, sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
- 2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
- 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
- 4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**
- 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

4.2 URAIAN KEGIATAN

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) ekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan

Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,

terdiri dari 11 (sebelas) Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai ;
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- 7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- 8) Pemindahan Tugas ASN
- 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari

10 (sepuluh) Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Penyediaan Bahan/Material;
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pengadaan Mebel;
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
- 6) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 8) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah

j. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 18 (sepuluh) Sub Kegiatan:

- 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
- 2) Pembangunan Puskesmas
- 3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 4) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 5) Pengembangan Puskesmas
- 6) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- 8) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 9) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 10) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 11) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 12) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- 13) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 14) Pengembangan Rumah Sakit

- 15) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
- 17) Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
- 18) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 46 (empat puluh enam) sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV;
- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

- 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
- 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- 18) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya;
- 20) Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- 21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 23) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan;
- 24) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 25) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 26) Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah;
- 27) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional;
- 28) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 29) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 30) Operasional Pelayanan Rumah Sakit;
- 31) Operasional Pelayanan Puskesmas;
- 32) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 33) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 34) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);
- 35) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
- 36) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);

- 37) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis;
- 38) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV);
- 39) Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
- 40) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
- 41) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
- 42) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
- 43) Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan;
- 44) Pengelolaan Layanan Imunisasi
- 45) Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik
- 46) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- 2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
- 4) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

e. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Manajemen Puskesmas
- 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang

mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah
Kabupaten/Kota

- 3) Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
- 4) Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
- 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya
- 6) Pelayanan Kesehatan Penderita IMS
- 7) Pelayanan Kesehatan Penderita Campak
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis
- 10) Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan
- 11) Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia
- 12) Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
- 13) Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota
- 14) Penyusunan Kebijakan/ Regulasi Bidang kesehatan
- 15) Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan
- 16) Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 17) Penanggulangan penyakit IMS
- 18) Penanggulangan penyakit Kusta
- 19) Penanggulangan penyakit Filariasis
- 20) Penanggulangan penyakit Kecacingan
- 21) Penanggulangan penyakit Frambusia
- 22) Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi

- 23) Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota
- 24) Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.

b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :

- 1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar;
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

c. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :

- 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

b. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM), terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

e. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

f. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman

b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
- 2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

c. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

- 1) Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pagu indikatif anggaran merupakan rencana kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan urusan kesehatan. Pagu tersebut berasal dari berbagai sumber dana baik APBD, Bantuan keuangan Provinsi, APBN (DAK) maupun sumber dana lainnya yang sah.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/ kegiatan/ sub kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2. Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3. Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, **berfungsinya output kegiatan** pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan.

Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator Target, Dan Pagu Indikatif yang terdapat pada **Tabel 4.1**

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DINAS KESEHATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud

dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang di gunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang terdapat pada **Tabel 4.1 (Dinas Kesehatan), 4.2 (RSUD Bengkalis), dan 4.3 (RSUD Mandau)**

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan **Dinas Kesehatan** Kabupaten Bengkalis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												CATATAN
														2025		2026		2027		2028		2029		2030		
														TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Pengelolaan SDM Daerah yang Berdaya Saing Dan Berkarakter	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					1. Predikat akuntabilitas kinerja																				
						2. Usia Harapan																				
						2.1 Penurunan																				
						2.2 Indeka																				
						2.3 Prevalensi																				
		1.1 Peningkatan kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan												Rp 400.525.343.430		Rp 404.509.605.373		Rp 421.965.660.981		Rp 433.082.956.929		Rp 438.115.060.893				
			1.1.1 Persentase Pelayanan Penunjang bidang urusan perangkat daerah				001	02	001		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	%	100%	100%	Rp 240.724.892.854	100%	Rp 242.582.771.981	100%	Rp 250.166.750.788	100%	Rp 255.045.452.979	100%	Rp264.224.602.624		
			1.1.1.1 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				001	02	001	201	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	%	97%	99%	Rp 3.500.000.000	99%	Rp 3.500.000.000	99%	Rp 3.500.000.000	99%	Rp 3.500.000.000	99%	Rp 3.500.000.000		
					1.1.1.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	001	02	001	201	0001 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	5	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000		
					1.1.1.1.2 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		02	001	201	0002 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	0	10	Rp 500.000.000	10	Rp 500.000.000	10	Rp 500.000.000	10	Rp 500.000.000	10	Rp 500.000.000		
					1.1.1.1.3 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	001	02	001	201	0003 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	0	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000		
					1.1.1.1.4 Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	001	02	001	201	0004 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	0	Dokumen	0	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000		

					1.1.1.1.5 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	001	02	001	201	0005	1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	0	5	Rp	500.000.000	5	Rp	500.000.000	5	Rp	500.000.000	5	Rp	500.000.000	5	Rp	500.000.000
					1.1.1.1.6 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	001	02	001	201	0006	1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49	Laporan	12	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
					1.1.1.1.7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	001	02	001	201	0007	1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
					1.1.1.2 Persentase penyediaan administrasi keuangan		001	02	001	202		1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	%	100%	100%	Rp	173.413.125.654	100%	Rp	175.271.004.781	100%	Rp	182.854.983.588	100%	Rp	187.733.685.779	100%	Rp	196.912.835.424
					1.1.1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	001	02	001	202	0001	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	690	Orang	1035	1035	Rp	169.913.125.654	1035	Rp	171.771.004.781	1035	Rp	179.354.983.588	1035	Rp	184.233.685.779	1035	Rp	193.412.835.424
					1.1.1.2.2 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	001	02	001	202	0002	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	Dokumen	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
					1.1.1.2.3 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	001	02	001	202	0003	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dokumen	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
					1.1.1.2.4 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	001	02	001	202	0004	1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	Dokumen	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
					1.1.1.2.5 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	001	02	001	202	0005	1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	12	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
					1.1.1.2.6 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	001	02	001	202	0006	1.2.6 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	Dokumen	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
					1.1.1.2.7 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	001	02	001	202	0007	1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	Laporan	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000

				1.1.1.2.8 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	001	02	001	202	0008	1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	Dokumen	0	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
				1.1.1.3 Persentase penyediaan administrasi Barang Milik Daerah		001	02	001	203		1.3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	%	100%	100%	Rp	3.500.000.000	100%	Rp	3.500.000.000	100%	Rp	3.500.000.000	100%	Rp	3.500.000.000	100%	Rp	3.500.000.000
				1.1.1.3.1 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	001	02	001	203	0001	1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.3.2 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	001	02	001	203	0002	1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	12	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.3.3 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	001	02	001	203	0003	1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.3.4 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	001	02	001	203	0004	1.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.3.5 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	001	02	001	203	0005	1.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.3.6 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	001	02	001	203	0006	1.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	001	02	001	203	0007	1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.4 Persentase penyediaan administrasi		001	02	001	204		1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	%	100%	100%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000
				1.1.1.4.1 Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	001	02	001	204	0007	1.4.1 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	Laporan	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.5 Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan		001	02	001	205		1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93%	%	94%	95%	Rp	5.500.000.000	95%	Rp	5.500.000.000	95%	Rp	5.500.000.000	95%	Rp	5.500.000.000	95%	Rp	5.500.000.000
				1.1.1.5.1 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	001	02	001	205	0001	1.5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	0	23	Rp	500.000.000	23	Rp	500.000.000	23	Rp	500.000.000	23	Rp	500.000.000	23	Rp	500.000.000

					1.1.1.5.2 Tersedianya Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	001	02	001	205	0002	1.5.2 Pengadaan Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	0	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.3 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian	001	02	001	205	0003	1.5.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	0	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.4 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	001	02	001	205	0004	1.5.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	0	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.5 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	001	02	001	205	0005	1.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	12	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.6 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	001	02	001	205	0006	1.5.6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	0	Orang	0	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.7 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	001	02	001	205	0007	1.5.7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	Laporan	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.8 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	001	02	001	205	0008	1.5.8 Pemindahan Tugas ASN	0	Orang	0	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.9 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	001	02	001	205	0009	1.5.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150	Orang	150	150	Rp	500.000.000	150	Rp	500.000.000	150	Rp	500.000.000	150	Rp	500.000.000	150	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.10 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	001	02	001	205	0010	1.5.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0	100	Rp	500.000.000	100	Rp	500.000.000	100	Rp	500.000.000	100	Rp	500.000.000	100	Rp	500.000.000
					1.1.1.5.11 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	001	02	001	205	0011	1.5.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	20	20	Rp	500.000.000	20	Rp	500.000.000	20	Rp	500.000.000	20	Rp	500.000.000	20	Rp	500.000.000
				1.1.1.6 Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas			001	02	001	206		1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	%	100%	100%	Rp	5.000.000.000	100%	Rp	5.000.000.000	100%	Rp	5.000.000.000	100%	Rp	5.000.000.000	100%	Rp	5.000.000.000
					1.1.1.6.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	001	02	001	206	0001	1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
					1.1.1.6.2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	001	02	001	206	0002	1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	2	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000

					1.1.1.6.3 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	001	02	001	206	0003	1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	Paket	0	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
					1.1.1.6.4 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	001	02	001	206	0004	1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	1	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
					1.1.1.6.5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	001	02	001	206	0005	1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	1	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000
					1.1.1.6.6 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	001	02	001	206	0006	1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38	Dokumen	38	38	Rp	500.000.000	38	Rp	500.000.000	38	Rp	500.000.000	38	Rp	500.000.000	38	Rp	500.000.000
					1.1.1.6.7 Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	001	02	001	206	0008	1.6.7 Fasilitas Kunjungan Tamu	0	Laporan	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
					1.1.1.6.8 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	001	02	001	206	0009	1.6.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	Laporan	400	400	Rp	500.000.000	400	Rp	500.000.000	400	Rp	500.000.000	400	Rp	500.000.000	400	Rp	500.000.000
					1.1.1.6.9 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	001	02	001	206	0010	1.6.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	Dokumen	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
					1.1.1.6.10 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	001	02	001	206	0011	1.6.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
				1.1.1.7 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			001	02	001	207		1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Dokumen	100%	100%	Rp	4.000.000.000	100%	Rp	4.000.000.000	100%	Rp	4.000.000.000	100%	Rp	4.000.000.000	100%	Rp	4.000.000.000
					1.1.1.7.1 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	001	02	001	207	0001	1.7.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	0	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000
					1.1.1.7.2 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	001	02	001	207	0002	1.7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	Unit	0	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000
					1.1.1.7.3 Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	001	02	001	207	0005	1.7.3 Pengadaan Mebel	0	Paket	0	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000
					1.1.1.7.4 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	001	02	001	207	0006	1.7.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Unit	0	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000	6	Rp	500.000.000
					1.1.1.7.5 Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	001	02	001	207	0007	1.7.5 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	Unit	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
					1.1.1.7.6 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	001	02	001	207	0009	1.7.6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
					1.1.1.7.7 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	001	02	001	207	0010	1.7.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000

				1.1.1.7.8 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	001	02	001	207	0011	1.7.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
				1.1.1.8 Persentase Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		001	02	001	208		1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	%	100%	100%	Rp	2.000.000.000	100%	Rp	2.000.000.000	100%	Rp	2.000.000.000	100%	Rp	2.000.000.000	100%	Rp	2.000.000.000
				1.1.1.8.1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	001	02	001	208	0001	1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.8.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	001	02	001	208	0002	1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.8.3 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	001	02	001	208	0003	1.8.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Laporan	0	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.8.4 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	001	02	001	208	0004	1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	500.000.000
				1.1.1.9 Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas		001	02	001	209		1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	%	100%	100%	Rp	4.500.000.000	100%	Rp	4.500.000.000	100%	Rp	4.500.000.000	100%	Rp	4.500.000.000	100%	Rp	4.500.000.000
				1.1.1.9.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	001	02	001	209	0001	1.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45	Unit	45	45	Rp	500.000.000	45	Rp	500.000.000	45	Rp	500.000.000	45	Rp	500.000.000	45	Rp	500.000.000
				1.1.1.9.2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	001	02	001	209	0002	1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	Unit	0	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000
				1.1.1.9.3 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	001	02	001	209	0005	1.9.3 Pemeliharaan Mebel	0	Unit	0	45	Rp	500.000.000	45	Rp	500.000.000	45	Rp	500.000.000	45	Rp	500.000.000	45	Rp	500.000.000
				1.1.1.9.4 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	001	02	001	209	0006	1.9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Unit	0	3	Rp	500.000.000	3	Rp	500.000.000	3	Rp	500.000.000	3	Rp	500.000.000	3	Rp	500.000.000
				1.1.1.9.5 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	001	02	001	209	0007	1.9.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	Unit	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000
				1.1.1.9.6 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	001	02	001	209	0009	1.9.6 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	2	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000

				1.1.1.9.7	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	001	02	001	209	0010	1.9.7 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	2	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	
				1.1.1.9.8	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	001	02	001	209	0011	1.9.8 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	
				1.1.1.9.9	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	001	02	001	209	0012	1.9.9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	0	Ha	0	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	2	Rp	500.000.000	
				1.1.1.10	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang menerapkan BLUD	001	02	001	210		1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	%	100%	100%	Rp	38.811.767.200	100%	Rp	38.811.767.200	100%	Rp	38.811.767.200	100%	Rp	38.811.767.200	100%	Rp	38.811.767.200	
				1.1.1.10.1	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	001	02	001	210	Rp 1	1.10.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20	Unit Kerja	21	22	Rp	38.811.767.200	22	Rp	38.811.767.200	22	Rp	38.811.767.200	22	Rp	38.811.767.200	22	Rp	38.811.767.200	
		2.1 Meningkatkan Kualitas/ Mutu Pelayanan Kesehatan dan pembiayaan kesehatan.																												
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau																												
		2.1.1 Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			1. Angka Kematian Ibu (AKI)	1	02	02			2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	%	100%	100%	Rp	155.733.606.693	100%	Rp	158.414.655.128	100%	Rp	167.977.753.898	100%	Rp	174.301.277.977	100%	Rp	170.199.986.248	
					2. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek Pada Balita)																									
					3. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun																									
					4. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat																									
					5. Prevalensi Obesitas > 18 tahun																									
					6. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar																									
					7. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan																									
					8. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat																									

						9. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional																					
						10. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna																					
						11. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar																					
						12. Persentase lanjut usia yang mandiri																					
						13. Persentase merokok penduduk 10-21 tahun																					
						14. Cakupan penemuan kasus TB																					
				2.1.1.1 Persentase Ketersediaan Obat,BMHP,Akses Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan		1	02	02	2.01		2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90%	%	90%	90%	Rp 26.350.000.000	90%	Rp 26.350.000.000	90%	Rp 31.550.000.000	90%	Rp 31.800.000.000	90%	Rp 29.750.000.000			
					2.1.1.1.1 Terpenuhnya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	02	02	2.01	0001	2.1.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1	Unit	1	1	Rp 15.000.000.000	1	Rp 15.000.000.000	1	Rp 18.000.000.000	1	Rp 18.000.000.000	1	Rp 17.950.000.000		
					2.1.1.1.2 Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	02	02	2.01	0002	2.1.2 Pembangunan Puskesmas	1	Unit	1	1	Rp 7.000.000.000	1	Rp 7.000.000.000	1	Rp 9.000.000.000	1	Rp 9.000.000.000	1	Rp 7.000.000.000		
					2.1.1.1.3 Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	02	02	2.01	0003	2.1.3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8	Unit	8	8	Rp 200.000.000	8	Rp 200.000.000	8	Rp 250.000.000	8	Rp 300.000.000	8	Rp 300.000.000		
					2.1.1.1.4 Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	02	02	2.01	0004	2.1.4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3	Unit	3	3	Rp 200.000.000	3	Rp 200.000.000	3	Rp 250.000.000	3	Rp 300.000.000	3	Rp 300.000.000		
					2.1.1.1.5 Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	02	02	2.01	0006	2.1.5 Pengembangan Puskesmas	4	Unit	4	4	Rp 200.000.000	4	Rp 200.000.000	4	Rp 250.000.000	4	Rp 300.000.000	4	Rp 300.000.000		
					2.1.1.1.6 Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	02	02	2.01	0007	2.1.6 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	Unit	4	4	Rp 200.000.000	4	Rp 200.000.000	4	Rp 250.000.000	4	Rp 300.000.000	4	Rp 300.000.000		

					2.1.1.1.7 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1	02	02	2.01	0008	2.1.7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0	Unit	0	3	Rp	250.000.000	3	Rp	250.000.000	3	Rp	250.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.8 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	02	02	2.01	0009	2.1.8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	25	Unit	25	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.9 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	02	02	2.01	0010	2.1.9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Unit	0	4	Rp	300.000.000	4	Rp	300.000.000	4	Rp	300.000.000	4	Rp	300.000.000	4	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.10 Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	02	02	2.01	0011	2.1.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	20	Unit	20	20	Rp	300.000.000	20	Rp	300.000.000	20	Rp	300.000.000	20	Rp	300.000.000	20	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.11 Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	02	02	2.01	0014	2.1.11 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25	Unit	25	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.12 Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1	02	02	2.01	0015	2.1.12 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	10	Unit	10	10	Rp	300.000.000	10	Rp	300.000.000	10	Rp	300.000.000	10	Rp	300.000.000	10	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.13 Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	02	02	2.01	0020	2.1.13 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25	Unit	25	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	25	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.14 Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah	1	02	02	2.01	0022	2.1.14 Pengembangan Rumah Sakit	0	0	0	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	

					2.1.1.1.15 Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	02	02	2.01	0023	2.1.15 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	150	Paket	150	150	Rp	300.000.000	150	Rp	300.000.000	150	Rp	300.000.000	150	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.16 Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1	02	02	2.01	0024	2.1.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	Keluarga	0	70	Rp	300.000.000	70	Rp	300.000.000	70	Rp	300.000.000	70	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.17 Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1	02	02	2.01	0025	2.1.17 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	0	Layanan	0	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	
					2.1.1.1.18 Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	02	02	2.01	0026	2.1.18 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	0	Paket	0	21	Rp	300.000.000	21	Rp	300.000.000	21	Rp	300.000.000	21	Rp	300.000.000	
				2.1.1.2 Persentase Capaian SPM Kesehatan			1	02	02	2.02		2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	%	100%	100%	Rp 128.895.847.608	100%	Rp 131.572.746.103	100%	Rp 135.890.464.945	100%	Rp 141.883.533.110	100%	Rp 139.942.241.381			
					2.1.1.2.1 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0001	2.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12394	Orang	12915	12915	Rp	300.000.000	12915	Rp	300.000.000	12915	Rp	300.000.000	12915	Rp	350.000.000	
					2.1.1.2.2 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0002	2.2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11831	Orang	12328	12328	Rp	300.000.000	12328	Rp	300.000.000	12328	Rp	300.000.000	12328	Rp	350.000.000	
					2.1.1.2.3 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0003	2.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11268	Orang	11741	11741	Rp	300.000.000	11741	Rp	300.000.000	11741	Rp	300.000.000	11741	Rp	350.000.000	
					2.1.1.2.4 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0004	2.2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	54600	Orang	59955	59955	Rp	300.000.000	59955	Rp	300.000.000	59955	Rp	400.000.000	59955	Rp	400.000.000	
					2.1.1.2.5 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0005	2.2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	139000	Orang	139000	139000	Rp	300.000.000	139000	Rp	300.000.000	139000	Rp	400.000.000	139000	Rp	400.000.000	
					2.1.1.2.6 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0006	2.2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	398574	Orang	401.020	441.032	Rp	3.020.000.000	441.032	Rp	3.020.000.000	441.032	Rp	3.800.000.000	441.032	Rp	3.800.000.000	

					2.1.1.2.7 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0007	2.2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35339	Orang	54011	54011	Rp	300.000.000	54011	Rp	300.000.000	54011	Rp	400.000.000	54011	Rp	400.000.000	54011	Rp	400.000.000
					2.1.1.2.8 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0008	2.2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	122614	Orang	93.920	103.312	Rp	300.000.000	103.312	Rp	300.000.000	103.312	Rp	400.000.000	103.312	Rp	400.000.000	103.312	Rp	400.000.000
					2.1.1.2.9 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0009	2.2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80667	Orang	15.563	17.218	Rp	300.000.000	17.218	Rp	300.000.000	17.218	Rp	400.000.000	17.218	Rp	400.000.000	17.218	Rp	400.000.000
					2.1.1.2.10 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0010	2.2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	909	Orang	1008	1108	Rp	300.000.000	1108	Rp	300.000.000	1108	Rp	300.000.000	1108	Rp	350.000.000	1108	Rp	350.000.000
					2.1.1.2.11 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0011	2.2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9663	Orang	10323	8872	Rp	500.000.000	8872	Rp	500.000.000	8872	Rp	640.000.000	8872	Rp	650.000.000	8872	Rp	650.000.000
					2.1.1.2.12 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0012	2.2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	14367	Orang	14367	14367	Rp	400.000.000	14367	Rp	400.000.000	14367	Rp	800.000.000	14367	Rp	800.000.000	14367	Rp	700.000.000
					2.1.1.2.13 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0013	2.2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	Dokumen	1	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	350.000.000	1	Rp	295.000.000
					2.1.1.2.14 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0014	2.2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	Dokumen	2	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	350.000.000	2	Rp	100.000.000
					2.1.1.2.15 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	02	02	2.02	0015	2.2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2	Dokumen	2	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	350.000.000	2	Rp	240.000.000
					2.1.1.2.16 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	02	02	2.02	0016	2.2.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	Dokumen	2	2	Rp	59.217.400	2	Rp	59.217.400	2	Rp	69.653.054	2	Rp	78.818.359	2	Rp	78.818.359
					2.1.1.2.17 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	02	02	2.02	0017	2.2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	Dokumen	2	2	Rp	250.000.000	2	Rp	250.000.000	2	Rp	250.000.000	2	Rp	250.000.000	2	Rp	250.000.000

					2.1.1.2.18 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	02	02	2.02	0018	2.2.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	1	1	Rp	50.000.000	1	Rp	50.000.000	1	Rp	80.000.000	1	Rp	80.000.000	1	Rp	80.000.000
					2.1.1.2.19 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	02	02	2.02	0019	2.2.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	1	1	Rp	19.800.000	1	Rp	19.800.000	1	Rp	19.800.000	1	Rp	19.800.000	1	Rp	19.800.000
					2.1.1.2.20 Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	02	02	2.02	0020	2.2.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	Dokumen	3	3	Rp	340.000.000	3	Rp	350.000.000	3	Rp	350.000.000	3	Rp	350.000.000	3	Rp	240.000.000
					2.1.1.2.21 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1	02	02	2.02	0021	2.2.21 Pengelolaan dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	Orang	2015	2015	Rp	300.000.000	2015	Rp	300.000.000	2015	Rp	300.000.000	2015	Rp	350.000.000	2015	Rp	240.000.000
					2.1.1.2.22 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1	02	02	2.02	0022	2.2.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5	Orang	5	6	Rp	300.000.000	6	Rp	300.000.000	6	Rp	300.000.000	6	Rp	350.000.000	6	Rp	240.000.000
					2.1.1.2.23 Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	02	02	2.02	0024	2.2.23 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0	Dokumen	0	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	350.000.000	3	Rp	240.000.000
					2.1.1.2.24 Terlaksananya Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	02	02	2.02	0025	2.2.24 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10	Dokumen	10	10	Rp	2.580.372.501	10	Rp	2.580.372.501	10	Rp	2.580.372.501	10	Rp	2.580.372.501	10	Rp	2.580.372.501
					2.1.1.2.25 Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	02	02	2.02	0026	2.2.25 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	12	12	Rp	94.858.380.939	12	Rp	97.422.721.277	12	Rp	97.516.684.251	12	Rp	101.689.890.526	12	Rp	102.188.598.797
					2.1.1.2.26 Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1	02	02	2.02	0027	2.2.26 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	0	Orang	0	5	Rp	300.000.000	5	Rp	300.000.000	5	Rp	300.000.000	5	Rp	350.000.000	5	Rp	240.000.000
					2.1.1.2.27 Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	1	02	02	2.02	0028	2.2.27 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	0	Paket	0	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	350.000.000	1	Rp	240.000.000
					2.1.1.2.28 Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	1	02	02	2.02	0029	2.2.28 Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	1	Dokumen	1	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	350.000.000	1	Rp	240.000.000

					2.1.1.2.29 Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1	02	02	2.02	0030	2.2.29 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	Unit	0	8	Rp	300.000.000	8	Rp	300.000.000	8	Rp	300.000.000	8	Rp	350.000.000	8	Rp	240.000.000	
					2.1.1.2.30 Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	02	02	2.02	0032	2.2.30 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	Dokumen	1	1	Rp	6.516.294.695	1	Rp	6.516.294.695	1	Rp	6.516.294.695	1	Rp	6.516.294.695	1	Rp	6.516.294.695	
					2.1.1.2.31 Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	02	02	2.02	0033	2.2.31 Operasional Pelayanan Puskesmas	1	Dokumen	1	1	Rp	7.759.113.863	1	Rp	7.759.113.863	1	Rp	9.388.527.774	1	Rp	9.842.380.551	1	Rp	10.327.380.551	
					2.1.1.2.32 Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	02	02	2.02	0034	2.2.32 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Dokumen	2	2	Rp	2.235.694.596	2	Rp	2.235.694.596	2	Rp	2.235.694.596	2	Rp	2.235.694.596	2	Rp	2.235.694.596	
					2.1.1.2.33 Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	02	02	2.02	0035	2.2.33 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2	Unit	2	2	Rp	550.000.000	2	Rp	550.000.000	2	Rp	850.000.000	2	Rp	1.000.000.000	2	Rp	1.000.000.000	
					2.1.1.2.34 Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	02	02	2.02	0036	2.2.34 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	Layanan	0	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	350.000.000	1	Rp	240.000.000	
					2.1.1.2.35 Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	02	02	2.02	0037	2.2.35 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	Dokumen	0	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	350.000.000	1	Rp	200.000.000	
					2.1.1.2.36 Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	02	02	2.02	0038	2.2.36 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	2	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	350.000.000	2	Rp	240.000.000	
					2.1.1.2.37 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	02	02	2.02	0040	2.2.37 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	1791	Orang	1912	1643	Rp	300.000.000	1643	Rp	300.000.000	1643	Rp	300.000.000	1643	Rp	350.000.000	1643	Rp	240.000.000	
					2.1.1.2.38 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	02	02	2.02	0041	2.2.38 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	98	Orang	653	653	Rp	300.000.000	653	Rp	300.000.000	653	Rp	500.000.000	653	Rp	500.000.000	653	Rp	140.000.000	
					Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3974	Orang	3974	3974	Rp	300.000.000	3974	Rp	300.000.000	3974	Rp	400.000.000	3974	Rp	400.000.000	3974	Rp	100.000.000	

					2.1.1.2.39 Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1	02	02	2.02	0043	2.2.39 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	0	Tatanan	1	1	Rp	50.000.000	1	Rp	75.000.000	1	Rp	75.000.000	1	Rp	100.000.000	1	Rp	100.000.000	
					2.1.1.2.40 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	02	02	2.02	0044	2.2.40 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	Dokumen	1	1	Rp	331.392.057	1	Rp	341.392.057	1	Rp	400.984.389	1	Rp	441.082.828	1	Rp	441.082.828	
					2.1.1.2.41 Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	02	02	2.02	0045	2.2.41 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	350.000.000	2	Rp	240.000.000	
					2.1.1.2.42 Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	02	02	2.02	0046	2.2.42 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	Dokumen	1	1	Rp	299.959.765	1	Rp	329.955.742	1	Rp	362.951.316	1	Rp	399.246.448	1	Rp	399.246.448	
					2.1.1.2.43 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1	02	02	2.02	0047	2.2.43 Pengelolaan Pelayanan Kelanjut usiaan	0	Dokumen	1	1	Rp	375.621.792	1	Rp	413.183.972	1	Rp	454.502.369	1	Rp	499.952.606	1	Rp	499.952.606	
					2.1.1.2.44 Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	02	02	2.02	0048	2.2.44 Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	Dokumen	3	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	300.000.000	3	Rp	240.000.000	
					2.1.1.2.45 Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	02	02	2.02	0049	2.2.45 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	0	Dokumen	1	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	350.000.000	1	Rp	240.000.000	
					2.1.1.2.46 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	02	02	2.02	0050	2.2.46 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0	Dokumen	1	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	300.000.000	1	Rp	350.000.000	1	Rp	240.000.000	
				2.1.1.3 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1	02	02	2.03		2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100%	%	100%	100%	Rp	300.000.000	100%	Rp	300.000.000	100%	Rp	300.000.000	100%	Rp	350.000.000	100%	Rp	240.000.000	
					2.1.1.3.1 Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	02	02	2.03	0002	2.3.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	12	12	Rp	300.000.000	12	Rp	300.000.000	12	Rp	300.000.000	12	Rp	350.000.000	12	Rp	240.000.000	
				2.1.1.4 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1	02	02	2.04		2.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	%	100%	100%	Rp	187.759.085	100%	Rp	191.909.025	100%	Rp	237.288.953	100%	Rp	267.744.867	100%	Rp	267.744.867	
					2.1.1.4.1 Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diaawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diaawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	02	02	2.04	0001	2.4.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	Unit	0	8	Rp	45.490.754	8	Rp	48.188.905	8	Rp	69.826.686	8	Rp	83.792.023	8	Rp	83.792.023	
					2.1.1.4.2 Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1	02	02	2.04	0002	2.4.2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0	Unit	7	8	Rp	50.000.000	8	Rp	50.000.000	8	Rp	50.000.000	8	Rp	50.000.000	8	Rp	50.000.000	

					2.1.1.4.3 Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	02	02	2.04	0003	2.4.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	6	Unit	7	8	Rp	57.258.947	8	Rp	58.710.736	8	Rp	82.452.883	8	Rp	98.943.460	8	Rp	98.943.460	
					2.1.1.4.4 Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	02	02	2.04	0004	2.4.1.4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Dokumen	2	2	Rp	35.009.384	2	Rp	35.009.384	2	Rp	35.009.384	2	Rp	35.009.384	2	Rp	35.009.384	
		3.1 Meningkatkan Kualitas / Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai standar																													
			3.1.1 Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		1. Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	1	02	03			3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100%	%	100%	100%	Rp	1.332.501.272	100%	Rp	1.236.972.856	100%	Rp	1.182.465.753	100%	Rp	1.123.462.898	100%	Rp	1.089.716.942		
					2. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi																										
					3. Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar																										
					4. Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar																										
				3.1.1.1 Persentase tenaga kesehatan memiliki izin praktek di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1	02	03	2.01		3.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	585	%	585	585	Rp	482.501.272	585	Rp	456.972.856	585	Rp	432.465.753	585	Rp	433.462.898	585	Rp	429.716.942		
					3.1.1.1.1 Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	02	03	2.01	0001	3.1.1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokumen	1	1	Rp	282.501.272	1	Rp	296.972.856	1	Rp	307.465.753	1	Rp	318.462.898	1	Rp	319.716.942	
					3.1.1.1.2 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	02	03	2.01	0002	3.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokumen	1	1	Rp	200.000.000	1	Rp	160.000.000	1	Rp	125.000.000	1	Rp	115.000.000	1	Rp	110.000.000	
				3.1.1.2 Jumlah Puskesmas dan RSUD yang kesehatannya sesuai standar		1	02	03	2.02		3.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	%	100%	100%	Rp	340.000.000	100%	Rp	440.000.000	100%	Rp	375.000.000	100%	Rp	345.000.000	100%	Rp	330.000.000		
					3.1.1.2.1 Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	02	03	2.02	0001	3.2.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8	Dokumen	8	8	Rp	170.000.000	8	Rp	170.000.000	8	Rp	125.000.000	8	Rp	115.000.000	8	Rp	110.000.000	

					3.1.1.2.2 Terpenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	02	03	2.02	0002	3.2.2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	152	Orang	152	152	Rp	-	152	Rp	100.000.000	152	Rp	125.000.000	152	Rp	115.000.000	152	Rp	110.000.000	
					3.1.1.2.1 Terlaksana Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	02	03	2.02	0003	3.2.3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30	Dokumen	3	1	Rp	170.000.000	1	Rp	170.000.000	1	Rp	125.000.000	1	Rp	115.000.000	1	Rp	110.000.000	
					3.1.1.3 Presentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya dengan Ujian Kompetensi, Fungsional dan Bimbingan Teknis		1	02	03	2.03		3.3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	%	100%	100%	Rp	510.000.000	100%	Rp	340.000.000	100%	Rp	375.000.000	100%	Rp	345.000.000	100%	Rp	330.000.000	
					3.1.1.3.1 Terlaksana Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1	02	03	2.03	0001	3.3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	585	Orang	150	150	Rp	170.000.000	150	Rp	170.000.000	150	Rp	125.000.000	150	Rp	115.000.000	150	Rp	110.000.000	
					3.1.1.3.2 Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1	02	03	3.03	0002	3.3.2 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	Orang	150	150	Rp	170.000.000	150	Rp	170.000.000	150	Rp	125.000.000	150	Rp	115.000.000	150	Rp	110.000.000	
					3.1.1.3.3 Terlaksana peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	1	02	03	3.03	0003	3.3.3 Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	0	Orang	5	5	Rp	170.000.000	5	Rp	-	5	Rp	125.000.000	5	Rp	115.000.000	5	Rp	110.000.000	
			4.1 Meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian sesuai standar																												
			4.1.1 Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman		Persentase cakupan sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	1	02	04				4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	95%	%	95%	95%	Rp	1.481.297.248	95%	Rp	1.450.556.836	95%	Rp	1.458.768.584	95%	Rp	1.454.509.965	95%	Rp	1.477.292.934	
				4.1.1.1 Jumlah Apotek yang memenuhi syarat		1	02	04	2.01			4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90%	%	90%	90%	Rp	315.000.000	90%	Rp	300.000.000	90%	Rp	300.000.000	90%	Rp	300.000.000	90%	Rp	300.000.000	
					4.1.1.1.1 Terlaksana Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	02	04	2.01	0001	4.1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18	Dokumen	18	18	Rp	315.000.000	18	Rp	300.000.000	18	Rp	300.000.000	18	Rp	300.000.000	18	Rp	300.000.000	

				4.1.1.2 Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		1	02	04	2.02		4.2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0	%	0	56	Rp	200.000.000	56	Rp	200.000.000	56	Rp	200.000.000	56	Rp	200.000.000	56	Rp	200.000.000	
				4.1.1.2.1 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	02	04	2.02	0001	4.2.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0	Dokumen	0	2	Rp	200.000.000	2	Rp	200.000.000	2	Rp	200.000.000	2	Rp	200.000.000	2	Rp	200.000.000	
				4.1.1.3 Persentase ritel pangan memenuhi syarat		1	02	04	2.03		4.3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	%	0	56	Rp	315.000.000	56	Rp	300.000.000	56	Rp	300.000.000	56	Rp	300.000.000	56	Rp	300.000.000	
				4.1.1.3.1 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	02	04	2.03	0001	4.3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	Dokumen	2	2	Rp	315.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	
				4.1.1.4 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat		1	02	04	2.04		4.4 Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	56	%	56	56	Rp	315.000.000	56	Rp	310.000.000	56	Rp	300.000.000	56	Rp	300.000.000	56	Rp	300.000.000	
				4.1.1.4.1 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	02	04	2.04	0001	4.4.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	Dokumen	2	2	Rp	315.000.000	2	Rp	310.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	2	Rp	300.000.000	

				4.1.1.5 Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		1	02	04	2.05		4.5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	%	0	56	Rp 310.000.000	56	Rp 310.000.000	56	Rp 300.000.000	56	Rp 300.000.000	56	Rp 300.000.000		
				4.1.1.5.1 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	02	04	2.05	0001	4.5.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	0	2	Rp 310.000.000	2	Rp 310.000.000	2	Rp 300.000.000	2	Rp 300.000.000	2	Rp 300.000.000			
				4.1.1.6 Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		1	02	04	2.06		4.6 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	0	%	0	56	Rp 26.297.248	56	Rp 30.556.836	56	Rp 58.768.584	56	Rp 54.509.965	56	Rp 77.292.934		
					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1	02	04	2.06	0001	4.6.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	0	0	50	50	Rp 26.297.248	50	Rp 30.556.836	50	Rp 58.768.584	50	Rp 54.509.965	50	Rp 77.292.934	
		5.1 Meningkatnya Kualitas /Mutu Pelayanan Kesehatan dan pembinaan kesehatan																								
			5.1.1 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1	02	05			5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100%	%	100%	100%	Rp 1.253.045.363	100%	Rp 824.648.572	100%	Rp 1.179.921.958	100%	Rp 1.158.253.110	100%	Rp 1.123.462.145		
				5.1.1.1 Cakupan Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		1	02	05	2.01		5.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	%	100%	100%	Rp 520.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 440.000.000	100%	Rp 440.000.000	100%	Rp 440.000.000		
				5.1.1.1.1 Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	02	05	2.01	0001	5.1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	12	12	Rp 260.000.000	12	Rp 150.000.000	12	Rp 220.000.000	12	Rp 220.000.000	12	Rp 220.000.000		
				5.1.1.1.2 Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/ masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	1	02	05	2.01	0002	5.1.2 Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	0	Unit	0	174656	Rp 260.000.000	174656	Rp 150.000.000	174656	Rp 220.000.000	174656	Rp 220.000.000	174656	Rp 220.000.000		

				5.1.1.2 Cakupan Tataman Sehat			1	02	05	2.02		5.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10%	%	100%	100%	Rp 540.000.000	100%	Rp 310.000.000	100%	Rp 440.000.000	100%	Rp 440.000.000	100%	Rp 440.000.000	
				5.1.1.2.1 Terseleenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1	02	05	2.02	0001	5.2.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12	Dokumen	10	10	Rp 270.000.000	10	Rp 155.000.000	10	Rp 220.000.000	10	Rp 220.000.000	10	Rp 220.000.000	
				5.1.1.2.2.Terlaksan anya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1	02	05	2.02	0002	5.2.2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	17	Keluarga	12	12	Rp 270.000.000	12	Rp 155.000.000	12	Rp 220.000.000	12	Rp 220.000.000	12	Rp 220.000.000	
				5.1.3 Cakupan Posyandu Aktif			1	02	05	2.03		5.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32%	%	100%	100%	Rp 193.045.363	100%	Rp 214.648.572	100%	Rp 299.921.958	100%	Rp 278.253.110	100%	Rp 243.462.145	
				5.1.3.1 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1	02	05	2.03	0001	5.3.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10	Dokumen	2	2	Rp 193.045.363	2	Rp 214.648.572	2	Rp 299.921.958	2	Rp 278.253.110	2	Rp 243.462.145	

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan **RSUD Bengkalis** Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAN SATUAN	URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME DAN SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET OUTCOME DAN PAGU ANGGARAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2026 - 2030									
										2026		2027		2028		2029		2030	
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)							74,21	74,34	74,55		74,76		74,97		75,18		75,40	
		1.1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit					5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)		5 (Paripurna)		5 (Paripurna)		5 (Paripurna)		5 (Paripurna)	
		1.2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat					94.01	93	95		95		95		95		95	
		1.3. Terlaksananya Pelayanan Spesialistik Unggulan Pengampunan	Persentase Pelayanan Spesialistik Unggulan					-	50%	55%		65%		70%		75%		85%	
		1.4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					BB	BB	A		A		A		A		A	
				1. Kesehatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor	100	100	100	149.213.546.158,84	100	164.134.900.774,72	100	180.548.390.852,20	100	198.603.229.937,42	100	218.463.552.931,16
					1.1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	324.134.720,00	100	356.548.192,00	100	392.203.011,20	100	431.423.312,32	100	474.565.643,55
					1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	12	265.866.000,00	12	292.452.600,00	12	321.697.860,00	12	353.867.646,00	12	389.254.410,60
					1.1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	58.268.720,00	1	64.095.592,00	1	70.505.151,20	1	77.555.666,32	1	85.311.232,95
					1.2. Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100	100	100	74.671.664.084,64	100	82.138.830.493,10	100	90.352.713.542,41	100	99.387.984.896,66	100	109.326.783.386,32
					1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	556	556	556	74.671.664.084,64	556	82.138.830.493,10	556	90.352.713.542,41	556	99.387.984.896,66	556	109.326.783.386,32

					1.3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna	100	100	100	1.087.125.000,00	100	1.195.837.500,00	100	1.315.421.250,00	100	1.446.963.375,00	100	1.591.659.712,50
					1.3.1. Pengamanan barang milik daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34	34	34	1.087.125.000,00	34	1.195.837.500,00	34	1.315.421.250,00	34	1.446.963.375,00	34	1.591.659.712,50
					1.4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN	100	100	100	209.516.000,00	100	230.467.600,00	100	253.514.360,00	100	278.865.796,00	100	306.752.375,60
					1.4.1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	380	380	380	100.000.000,00	380	110.000.000,00	380	121.000.000,00	380	133.100.000,00	380	146.410.000,00
					1.4.2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	20	109.516.000,00	20	120.467.600,00	20	132.514.360,00	20	145.765.796,00	20	160.342.375,60
					1.5. Administrasi umum perangkat daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran	100	100	100	606.515.494,00	100	667.167.043,40	100	733.883.747,74	100	807.272.122,51	100	887.999.334,77
					1.5.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	28	28	56.558.000,00	28	62.213.800,00	28	68.435.180,00	28	75.278.698,00	28	82.806.567,80
					1.5.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6	214.354.244,00	6	235.789.668,40	6	259.368.635,24	6	285.305.498,76	6	313.836.048,64
					1.5.3. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	5	64.047.250,00	5	70.451.975,00	5	77.497.172,50	5	85.246.889,75	5	93.771.578,73
					1.5.4. Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	2	87.250.000,00	2	95.975.000,00	2	105.572.500,00	2	116.129.750,00	2	127.742.725,00
					1.5.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	75.000.000,00	3	82.500.000,00	3	90.750.000,00	3	99.825.000,00	3	109.807.500,00
					1.5.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	10.000.000,00	3	11.000.000,00	3	12.100.000,00	3	13.310.000,00	3	14.641.000,00
					1.5.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	5	5	99.306.000,00	5	109.236.600,00	5	120.160.260,00	5	132.176.286,00	5	145.393.914,60

					1.6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor	100	100	100	2.035.635.003,20	100	2.239.198.503,52	100	2.463.118.353,87	100	2.709.430.189,26	100	2.980.373.208,19
					1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	1	62.000.000,00	1	68.200.000,00	1	75.020.000,00	1	82.522.000,00	1	90.774.200,00
					1.6.2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	1	62.000.000,00	1	68.200.000,00	1	75.020.000,00	1	82.522.000,00	1	90.774.200,00
					1.6.3. Pengadaan mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	4	361.635.003,20	4	397.798.503,52	4	437.578.353,87	4	481.336.189,26	4	529.469.808,19
					1.6.4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00	1	732.050.000,00
					1.6.5. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000,00	1	1.210.000.000,00	1	1.331.000.000,00	1	1.464.100.000,00
					1.6.6. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	3	60.500.000,00	3	66.550.000,00	3	73.205.000,00
					1.7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	100	100	100	6.530.625.000,00	100	7.183.687.500,00	100	7.902.056.250,00	100	8.692.261.875,00	100	9.561.488.062,50
					1.7.1. Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	72	72	2.652.000.000,00	72	2.917.200.000,00	72	3.208.920.000,00	72	3.529.812.000,00	72	3.882.793.200,00
					1.7.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	5	5	2.100.000.000,00	5	2.310.000.000,00	5	2.541.000.000,00	5	2.795.100.000,00	5	3.074.610.000,00
					1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	121.000.000,00	2	133.100.000,00	2	146.410.000,00
					1.7.4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	1.678.625.000,00	3	1.846.487.500,00	3	2.031.136.250,00	3	2.234.249.875,00	3	2.457.674.862,50
					1.8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas	100	100	100	3.647.330.857,00	100	4.012.063.942,70	100	4.413.270.336,97	100	4.854.597.370,67	100	5.340.057.107,73

					1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8	8	100.000.000,00	8	110.000.000,00	8	121.000.000,00	8	133.100.000,00	8	146.410.000,00
					1.8.2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	8	191.930.857,00	8	211.123.942,70	8	232.236.336,97	8	255.459.970,67	8	281.005.967,73
					1.8.3. Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	2	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	121.000.000,00	2	133.100.000,00	2	146.410.000,00
					1.8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	2	693.000.000,00	2	762.300.000,00	2	838.530.000,00	2	922.383.000,00	2	1.014.621.300,00
					1.8.5. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1.712.400.000,00	1	1.883.640.000,00	1	2.072.004.000,00	1	2.279.204.400,00	1	2.507.124.840,00
					1.8.6. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5	750.000.000,00	5	825.000.000,00	5	907.500.000,00	5	998.250.000,00	5	1.098.075.000,00
					1.8.7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5	100.000.000,00	5	110.000.000,00	5	121.000.000,00	5	133.100.000,00	5	146.410.000,00
					1.9. Peningkatan pelayanan BLUD		Persentase peningkatan pelayanan operasional pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD	100	100	100	60.101.000.000,00	100	66.111.100.000,00	100	72.722.210.000,00	100	79.994.431.000,00	100	87.993.874.100,00
					1.9.1 Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	60.101.000.000,00	1	66.111.100.000,00	1	72.722.210.000,00	1	79.994.431.000,00	1	87.993.874.100,00
					2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit	100	100	100	43.833.015.400,00	100	48.216.316.940,00	100	53.037.948.634,00	100	58.341.743.497,40	100	64.175.917.847,14

					2.1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota		Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit	100	100	100	41.750.000.000,00	100	45.925.000.000,00	100	50.517.500.000,00	100	55.569.250.000,00	100	61.126.175.000,00
					2.1.1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	1	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.210.000.000,00	1	1.331.000.000,00	1	1.464.100.000,00
					2.1.2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	1	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.210.000.000,00	1	1.331.000.000,00	1	1.464.100.000,00
					2.1.3. Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	1	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00	1	366.025.000,00
					2.1.4. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3	3	3	550.000.000,00	3	605.000.000,00	3	665.500.000,00	3	732.050.000,00	3	805.255.000,00
					2.1.5. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	22	22	22	200.000.000,00	22	220.000.000,00	22	242.000.000,00	22	266.200.000,00	22	292.820.000,00
					2.1.6. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	335	335	335	15.000.000.000,00	335	16.500.000.000,00	335	18.150.000.000,00	335	19.965.000.000,00	335	21.961.500.000,00
					2.1.7. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	5	5	5	100.000.000,00	5	110.000.000,00	5	121.000.000,00	5	133.100.000,00	5	146.410.000,00

					2.1.8. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3	3	3	1.150.000.000,00	3	1.265.000.000,00	3	1.391.500.000,00	3	1.530.650.000,00	3	1.683.715.000,00
					2.1.9. Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	1	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.210.000.000,00	1	1.331.000.000,00	1	1.464.100.000,00
					2.1.1. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	3	3	21.500.000.000,00	3	23.650.000.000,00	3	26.015.000.000,00	3	28.616.500.000,00	3	31.478.150.000,00
					2.2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		Persentase pemenuhan standar pelayanan	100	100	100	1.530.580.000,00	100	1.683.638.000,00	100	1.852.001.800,00	100	2.037.201.980,00	100	2.240.922.178,00
					2.2.1. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	2	2	180.000.000,00	2	198.000.000,00	2	217.800.000,00	2	239.580.000,00	2	263.538.000,00
					2.2.2. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	0	1	1.200.000.000,00	1	1.320.000.000,00	1	1.452.000.000,00	1	1.597.200.000,00	1	1.756.920.000,00
					2.2.3. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	1	1	150.580.000,00	1	165.638.000,00	1	182.201.800,00	1	200.421.980,00	1	220.464.178,00
					2.3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi		Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	100	100	100	552.435.400,00	100	607.678.940,00	100	668.446.834,00	100	735.291.517,40	100	808.820.669,14
					2.3.1. Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	59580	59580	59580	552.435.400,00	59580	607.678.940,00	59580	668.446.834,00	59580	735.291.517,40	59580	808.820.669,14

					3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		Persentase peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit	100	100	100	13.742.877.804,00	100	15.117.165.584,40	100	16.628.882.142,84	100	18.291.770.357,12	100	20.120.947.392,84
					3.1.	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia		Persentase pembayaran jasa pelayanan sumber daya manusia	100	100	100	13.507.750.000,00	100	14.858.525.000,00	100	16.344.377.500,00	100	17.978.815.250,00	100	19.776.696.775,00
					3.1.1.	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	262	262	262	13.507.750.000,00	262	14.858.525.000,00	262	16.344.377.500,00	262	17.978.815.250,00	262	19.776.696.775,00
					3.2.	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota		Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan rumah sakit	100	100	100	235.127.804,00	100	258.640.584,40	100	284.504.642,84	100	312.955.107,12	100	344.250.617,84
					3.2.1.	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	3	3	3	235.127.804,00	3	258.640.584,40	3	284.504.642,84	3	312.955.107,12	3	344.250.617,84
TOTAL PAGU RENSTRA												206.789.439.362,84		227.468.383.299,12		250.215.221.629,04		275.236.743.791,94		302.760.418.171,13
TOTAL PAGU RANKHIR RPJMD (hasil input OPD pada sipd renstra)												164.768.574.383,63		166.407.624.623,59		163.875.576.310,15		160.283.686.811,43		162.146.064.821,80

Tabel 4.3

Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan **RSUD Mandau** Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAN SATUAN	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCAME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCAME DAN SATUAN	BASE LINE 2024	TAR GET 2025	TARGET OUTCAME DAN PAGU ANGGARAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2026 - 2030									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup																		
		1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja					BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB	
				1. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	109.086.965.866,70	100	109.412.533.492,74	100	109.843.295.427,00	100	109.613.588.317,47	100	112.055.505.182,36
					1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanaa perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00
					1.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	7	300.000.000,00
					1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Keuangan Perangkat daerah	100	100	100	32.318.482.933,70	100	32.318.482.933,70	100	32.458.600.195,00	100	32.318.482.933,70	100	32.458.600.195,00
					1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	200	200	200	32.318.482.933,70	200	32.318.482.933,70	200	32.458.600.195,00	200	32.318.482.933,70	200	32.458.600.195,00
					1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00
					1.02.01.2.05.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00
					1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	-	-	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00

					1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00
					1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00
					1.02.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00
					1.02.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00
					1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	1.650.000.000,00	100	1.650.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.700.000.000,00
					1.02.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	16	150.000.000,00	16	150.000.000,00	16	200.000.000,00	16	200.000.000,00	16	200.000.000,00
					1.02.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00
					1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100	100	100	72.318.482.933,00	100	72.644.050.559,04	100	72.834.695.232,00	100	72.745.105.383,77	100	74.996.904.987,36
					1.02.01.2.10.00.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1	72.318.482.933,00	1	72.644.050.559,04	1	72.834.695.232,00	1	72.745.105.383,77	1	74.996.904.987,36
		1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat						92	93	94		95		96		97		98	
		1.3 Terlaksananya Pelayanan Spesialistik Unggulan	Persentase Pelayanan Spesialistik Unggulan						90	90	90		91		92		93		94	
					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	-	77	78		79		79,50		80		80	
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	80	83	86	37.573.154.738,56	89	39.207.504.616,23	92	41.174.851.044,76	95	42.746.659.742,36	97	42.075.056.384,19

					1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	37.273.154.738,56	100	38.807.504.616,23	100	40.674.851.044,76	100	42.376.659.742,36	100	41.575.056.384,19
					1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	93	108	20	18.286.577.369,56	20	19.103.752.308,23	20	20.087.425.522,76	20	21.073.329.871,36	20	20.537.528.192,19
					1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	300.000.000,00	25	500.000.000,00
					1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	3	2	18.486.577.369,00	2	19.203.752.308,00	2	20.087.425.522,00	2	21.003.329.871,00	2	20.537.528.192,00
					1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	100	100	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	100	370.000.000,00	100	500.000.000,00
					1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	-	-	5	300.000.000,00	5	400.000.000,00	5	500.000.000,00	5	370.000.000,00	5	500.000.000,00
		1.4. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit						Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna	
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	-	67	71	13.361.833.137,64	76	12.993.748.438,00	81	12.829.251.241,00	86	12.621.070.900,49	88	12.767.718.418,90
					1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	100	100	13.361.833.137,64	100	12.993.748.438,00	100	12.829.251.241,00	100	12.621.070.900,49	100	12.767.718.418,90
					1.02.03.2.02.002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	336	336	336	13.361.833.137,64	336	12.993.748.438,00	336	12.829.251.241,00	336	12.621.070.900,49	336	12.767.718.418,90
TOTAL PAGU RENSTRA												160.021.953.742,90		161.613.786.546,97		163.847.397.712,76		164.981.318.960,32		166.898.279.985,45

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia	71,92	74,43	74,55	74,76	74,97	75,4	75,6	DISKES
2	Jumlah kematian ibu	Kasus	5	15	14	13	12	11	10	DISKES
3	Jumlah kematian balita	Kasus	85	90	85	80	75	70	65	DISKES
4	Prevalensi stunting	%	14	18,8	17,7	16,5	15,4	14,2	13,1	DISKES
5	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	N/A	36	46,0	55,0	61,0	70	78	DISKES
6	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	80	80	85	90	93	95	98	DISKES
7	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	98	98,6	98,6	98,7	98,7	99	99,7	DISKES
8	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	90	90	90	90	90	90	99.2	DISKES
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKES
10	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	62,6 (SKI, 2023)	65	68	71	75	80	85	DISKES
11	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKES
12	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	92	93	94	95	96	97	98	DISKES

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

N O	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
1	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1 (satu) Tempat tidur berbanding 1000 penduduk	1,04	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	
2	Jumlah RS Rujukan yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	12915	12915	12915	12915	12915	12915	
4	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Orang	12328	12328	12328	12328	12328	12328	
5	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11741	11741	11741	11741	11741	11741	
6	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	59955	59955	59955	59955	59955	59955	
7	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	139000	139000	139000	139000	139000	139000	
8	Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Orang	401.020	401.020	401.020	401.020	401.020	401.020	
9	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Orang	54011	54011	54011	54011	54011	54011	

10	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	93.920	93.920	93.920	93.920	93.920	93.920	
11	Jumlah Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15.563	15.563	15.563	15.563	15.563	15.563	
12	Jumlah Penderita OODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1008	1008	1008	1008	1008	1008	
13	Jumlah Penderita TB yang Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	Orang	10323	10323	10323	10323	10323	10323	
14	Jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Orang	14367	14367	14367	14367	14367	14367	

4.7 INTERVENSI LAYANAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

Renstra memberikan arahan yang jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai, sasaran yang akan diukur, serta strategi dan program yang akan dilaksanakan. Dengan adanya Renstra, intervensi layanan kesehatan dapat terarah, terukur, dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya kesehatan yang dilakukan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Intervensi layanan dalam rencana strategis (Renstra) kesehatan merujuk pada serangkaian tindakan yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan. Intervensi ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemerataan akses pelayanan. Uraian Intervensi Layanan Dinas Kesehatan dapat dilihat dalam **Tabel 4.6** dan **Tabel 4.7**

Tabel 4.6
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	TARGET									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.915	100	12.915	100	12.915	100	12.915	100	12.915	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.328	100	12.328	100	12.328	100	12.328	100	12.328	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.741	100	11.741	100	11.741	100	11.741	100	11.741	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	59.955	100	59.955	100	59.955	100	59.955	100	59.955	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	115.225	100	115.225	100	115.225	100	115.225	100	115.225	100
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	401.020	100	401.020	100	401.020	100	401.020	100	401.020	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	54.011	100	54.011	100	54.011	100	54.011	100	54.011	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	93.920	100	93.920	100	93.920	100	93.920	100	93.920	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.652	100	15.652	100	15.652	100	15.652	100	15.652	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.008	100	1.008	100	1.008	100	1.008	100	1.008	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	10.325	100	10.325	100	10.325	100	10.325	100	10.325	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	14.367	100	14.367	100	14.367	100	14.367	100	14.367	100

Tabel 4.7
Intervensi Layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline (2024)	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	97,90	98,30	98,60	98,90	99,20	99,50
2	Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	74,90	77,92	80,94	83,96	86,98	90,00
5	Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	85,10	86,08	87,06	88,04	89,02	90,00
6	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	23,70	35,96	48,22	60,48	72,74	85,00
7	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)	96,00	98,20	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	42,90	48,92	54,94	60,96	66,98	73,00
9	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	50,00	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00
11	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
12	Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap	85,50	87,50	89,50	91,50	93,50	95,00
13	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada anak usia 6-23 bulan (baduta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	40,97	46,78	52,58	58,39	64,19	70,00
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi	91,90	92,52	93,14	93,76	94,38	95,00
18	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Penemuan kasus pneumonia balita	98,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)	55,61	60,49	65,37	70,25	75,13	80,01
22	Remaja putri yang diskriminasi anemia	39,35	47,48	55,61	63,74	71,87	80,00
23	Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	99,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional	99,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 berlaku selama 5 Tahun. Renstra menjabarkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, sasaran program, dan sasaran kegiatan serta rincian indikator untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh perangkat daerah, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Bengkalis selama periode 2025-2029 sejalan dengan berlakunya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini memiliki kedudukan yang fundamental dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama kurun waktu 5 tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, dan sasaran strategis serta arah kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Tahunan dan penyusunan Renstra 5 Tahun serta RBA, BLUD, UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit.

Selanjutnya dijalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan sebagai mekanisme kontrol dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good Governance*). Pencapaian Kinerja pelayanan kesehatan daerah ini merupakan bagian dari pencapaian kinerja yang secara nyata akan dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Desember 2025
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



ERMAN TO, SKM.,MKM
NIP. 19801216 200801 1 011